

**STUDY PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANTARA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI DENGAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 6 TEBING TINGGI DI SELATPANJANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

T E S I S

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan Islam dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam
Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH:

K A M I S A H

NIM: 1005 S2 1169

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1434 H / 2013 M**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis persembahkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, atas rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Adapun judul tesis ini adalah "*Study Perbandingan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti*".

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perbandingan antara Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Di antaranya bagaimana partisipasi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah, bagaimana respon masyarakat kepada teman/tetangga agar memasukkan anaknya ke madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama, bagaimana cara masyarakat memberikan idea atau gagasan untuk kemajuan sekolah, bagaimana masyarakat memberikan sumbangan materi, tenaga, membantu pembangunan infrastruktur, operasionalisasi kegiatan sekolah dan bagaimana masyarakat menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dan majelis guru serta bagaimana masyarakat memberikan pengawasan terhadap siswa dilingkungannya.

Setidaknya tesis ini bisa membuka wahana ilmiah tentang bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan antara Masdrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri khususnya di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian, semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pekanbaru, 7 Desember 2012

Penulis,

KAMISAH

NIM : 1005 S2 116

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Ucapan Terimakasih	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Bagan	vi
Pedoman Transletasi	vii
Abstrak 3 Bahasa	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah	5
3. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Partisipasi Masyarakat	7
1. Konsep Partisipasi	7
2. Konsep Pendidikan Agama Islam	12
3. Konsep Madrasah Tsanawiyah (MTs)	15
4. Konsep Sekolah Menengah Pertama (SMP)	22
5. Konsep Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan Agama	23
6. Manajemen Mutu dan Sekolah Efektif	26
7. Bersaing Dengan Peningkatan Mutu	40
B. Kajian Penelitian Terdahulu	42
C. Konsep Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	47
B. Metode Pembahasan	47
C. Jenis Penelitian	49
1. Responden Penelitian	49
2. Sumber Data	49
3. Teknik Pengumpulan Data	50
4. Teknik Analisa Data	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	
A. Gambaran Umum Madrasah Tsanawiyah Negeri(MTsN)	55
1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)	55
2. Visi	56

3. Misi	56
4. Sarana-Prasarana	57
5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan	60
6. Keadaan Siswa	66
7. Kurikulum	69
8. Struktur Organisasi	72
B. Gambaran Umum sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi.....	74
1. Identitas sekolah.....	74
2. Visi Sekolah	74
3. Misi sekolah	74
4. Sarana dan Prasarana	75
5. Keadaan Siswa	76
6. Tenaga Pendidik dan Kependidikan	76
7. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi.....	78
8. Kurikulum sekolah Menengah pertama Negeri 6 Tebing Tinggi	79
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutru Pendidikan terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri	83
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	110
E. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Keterangan Selesai Meneliti/Rekomendasi
- Instrumen Penelitian (Observasi/Angket/Wawancara)
- TOEFL
- Kartu Kontrol
- Daftar Riwayat Hidup (CV)

ABSTRAK

Kamisah, (2012), *Study Perbandingan Antara Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.*

Latar belakang dalam penelitian ini bahwa secara umum peran masyarakat terhadap sekolah-sekolah umum, seperti SMPN, lebih dominan dari partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di madrasah-madrasah. Tetapi beda halnya di Tebing Tinggi Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti masyarakat sekitar lebih memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka untuk sekolah di madrasah-madrasah dibandingkan di sekolah-sekolah umum, seperti SMPN. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak ke madrasah dibandingkan ke sekolah umum.

Untuk menemukan perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama 6 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri dalam peningkatan mutu pendidikan? (2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Selatpanjang dalam peningkatan mutu pendidikan? (3) Bagaimanakah perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis meneliti kejadian yang sedang berlangsung, yaitu perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Selatpanjang Kepulauan Meranti. Jenis penelitian ini adalah *Field research*, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, yakni mengadakan pengamatan langsung ke Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Juga wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat dan komite sekolah yang dapat memberikan data yang diperlukan. Demikian juga angket, yaitu teknik penelitian dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah guna mendapatkan data yang akurat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selat Panjang lebih baik dalam hal peningkatan mutu pendidikan dibandingkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini tercermin antusias masyarakat yang lebih banyak memasukan anaknya sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri dibandingkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

ABSTRACT

Kamisah, (2012), Comparative Study Between Public Participation in Education Quality Improvement Between Madrasah Tsanawiyah Negeri with Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 in Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

The background of this research that in general the role of society to public schools, such as SMP, more dominant than public participation in improving the quality of education in madrasah. But unlike the case in the Tebing Tinggi Selatpanjang regency Kepulauan Meranti communities prioritize education of their children to school in madrasah than in public schools, such as SMP. This proves that more public participation into madrasah compared to public schools.

To find a comparison of community participation in improving the quality of education between MTsN with SMPN 6 District Tebing Tinggi regency Kepulauan Meranti , the authors make the formulation of the problem as follows: (1) How to MTsN community participation in improving the quality of education? (2) How is public participation to High Cliff SMPN 6 Sub District Selatpanjang in improving the quality of education? (3) What proportion of community participation in improving the quality of education between MTsN with SMPN 6 District Tebing Tinggi Selatpanjang regency Meranti ?

The research method in this thesis is a comparative, ie by comparing the participation of the community in improving the quality of education between MTsN with SMPN 6 Selatpanjang. This research is field research (field research), the research conducted by plunging directly spaciousness to explore and examine the data relating to the title. While data collection techniques used in this research is to use a questionnaire, documentation and interviews of conducting inquiries to the school principal and school committee along with teachers about community participation towards MTsN and SMPN 6 Selatpanjang.

From the results of this study indicate that community participation towards MTsN SelatPanjang better in terms of improving the quality of education than SMPN 6 Tebingtinggi KepulauanMeranti District. This is reflected in the enthusiastic community of more children entering school in MTsN than in SMPN 6 Selatpanjang KepulauanMeranti District.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang terbesar umat Muslimnya. Oleh karenanya secara logika seharusnya masyarakat Muslim Indonesia berpartisipasi dalam pendidikan dan perguruan keagamaan sangat signifikan dan bahkan sangat dominan. Sepanjang sejarah pendidikan Islam, Masyarakat Muslim dalam skala yang tetap besar bukan hanya berperan serta-artinya ikut “nimrung”-tetapi bahkan mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan keagamaan.

Tuntutan pengembangan sumber daya manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Oleh karena itu layanan pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat memiliki peran tersendiri terhadap pendidikan. Peran dominan orang tua pada saat anak-anak dalam masa pertumbuhan hingga menjadi orang tua. Pada masa tersebut orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan pokok seorang anak. Sedangkan peran pada pendewasaan dan pematangan individu merupakan peran dari kelompok masyarakat.

Bukan hal yang asing, bila kita seringkali mendengar bahwa: Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, peran serta masyarakat masih

belum maksimal. Walaupun sekarang semua sekolah telah membentuk Komite Sekolah yang pada prinsipnya merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, namun belum berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Karena itu kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan
2. Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif.
3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.

Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat dalam kesatuan negara, kebudayaan, dan agama yang memiliki cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Hal itu sesuai pula dengan hak masyarakat dalam pendidikan yaitu mereka dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Pendidikan Islam di sekolah umum khususnya, terjadi distorsi kuantitas jam pelajaran yang mana hanya 2 jam dalam satu minggunya berbeda dengan sekolah-sekolah madrasah yang mana muatan pendidikan Islam sangat banyak. Ini menjadi salah satu masalah dalam pendidikan saat ini. Fenomena

yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak isu-isu yang muncul bahwa pendidikan/sekolah-sekolah umum menawarkan masa depan yang cerah dengan banyak bidang pekerjaan yang dapat diambil, sehingga masyarakat banyak memilih sekolah-sekolah umum sebagai pilihan untuk anak-anak mereka. Hampir merata di provinsi bahkan kabupaten sekolah-sekolah madrasah dianaktirikan oleh pemerintah bahkan juga oleh masyarakat, sehingga siswa yang masuk ke sekolah-sekolah madrasah sangat jauh berbanding dengan sekolah umum. Seperti informasi yang penulis dapatkan di beberapa daerah banyak sekolah-sekolah madrasah yang kekurangan siswa sehingga berakibat akan ditutupnya sekolah tersebut seperti MTs Pondok Pesantren Amanah Tarbiyah Islamiyah Rempak dengan SMPN 5 SabakAuh di Kabupaten Siak.

Akan tetapi berbeda di Kota Selatpanjang dimana peran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam (Madrasah Tsanawiyah Negeri) sangat tinggi. Masyarakat memiliki peran yang besar terhadap pendidikan Agama Islam dimana pilihan pendidikan untuk anak-anak mereka adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri, ini terbukti ketika tahun ajaran baru sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri menggungguli dari kapasitas siswa yang mendaftar.

Fenomena yang terjadi malah sebaliknya dimana sekolah umum (SMPN 06) yang hanya diminati oleh 5 orang siswa baru sehingga dimungkinkan akan ditutupnya sekolah tersebut. Ada hal-hal menarik dari fenomena ini dimana

sekolah madrasah menjadi unggulan bagi masyarakat padahal didaerah-daerah lain sekolah umum menjadi nomor satu atau pilihan pertama.

Bertitik tolak dari fenomena dan alasan inilah, penulis beranggapan bahwa masalah yang akan diangkat dalam tesis ini cukup menarik dan belum ada yang mengkaji, oleh karena itu layak untuk diangkat sebagai tesis. Adapun judul tesis yang penulis ajukan ialah “*Study Perbandingan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti*”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan SMPN 6 dibandingkan dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Adanya perbedaan partisipasi masyarakat dalam peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri dibandingkan Sekolah Menengah Pertama di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Adanya perbedaan system sosialisasi pendidikan madrasah dan umum di masyarakat antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dan SMP Negeri 6 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam masalah yaitu hanya berkisar pada: *"Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 dibandingkan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti"*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dapatan masalah di atas maka penulis dapat merinci rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimanakah analisis perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini adapun tujuan penelitiannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diberikan kepada beberapa aspek yaitu:

- a. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana penyambung informasi dari penulis terhadap masyarakat melalui tulisan (penelitian) ini sehingga bermanfaat sebagai wawasan keilmuan serta informasi tentang perbandingan pendidikan madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah pertama.

b. Bagi Guru

Sebagai masukan bagi guru madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah pertama dalam menjalin hubungan dengan masyarakat serta promosi pendidikan dan daya tarik sekolah.

c. Bagi Sekolah

Sebagai sumbangan pemikiran dalam hal partisipasi masyarakat terhadap madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah pertama.

d. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas perkuliahan terakhir pada pascasarjana UIN SUSKA RIAU untuk mendapatkan gelar keserjanaan (M.Pd.I) dan juga sebagai penambahan keilmuan untuk dapat dikembangkan kembali dilapangan pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Konsep Partisipasi

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak Bangsa telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keImanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka Mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, seluruh komponen Bangsa baik orang tua, masyarakat, maupun Pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan Bangsa melalui pendidikan. Hal ini adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada BAB IV Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 dan pasal 6, Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 dan Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 dan pasal 9.

Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dapat dilakukan sesuai Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan /Komite Sekolah merupakan Lembaga Independen yang mempunyai Visi dan Misi terciptanya masyarakat masa depan yang berkualitas, melalui kerja sama yang erat dengan sekolah yang tumbuh dari akar budaya, sosial, ekonomi, geografis, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekolah.

Lahirnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kembali ditegaskan pada pasal 56 ayat 1-4. Pasal 56 ayat (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pasal 56 ayat (2): Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Pasal 56 ayat (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pasal 56 ayat (4): Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (4) tersebut, pada 28 Januari 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Berikutnya pada 28 September 2010 diterbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan PP Nomor 17 tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan secara rinci segala aspek yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan demikian, operasionalisasi dan eksistensi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah memenuhi aspek yuridis-legalistik.

Menurut Ali Imron “partisipasi” adalah suatu lembaga pendidikan bersama masyarakat hendaknya mengembangkan program kegiatan dan layanan guna memperluas, memperbaharui, memadukan pengalaman berbagai kelompok. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dan warga sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu perlu dimaksimalkan makin tinggi tingkat partisipasi makin besar rasa memiliki, makin besar rasa tanggung jawab dan akhirnya makin besar pula tingkat dedikasinya.

Masyarakat yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Kelompok ini berupa organisasi-organisasi pendidikan, social, politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Semua kelompok ini perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu dan mendukung penyelenggaraan pendidikan.¹

Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill. Menurut Hetifah Sj. Soemarto partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.²

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang pendidikan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan di tempat mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan,

¹ Ali Imron, dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Malang; UNM, 2000), h 122-123

² Ibid, h. 124

melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan masyarakatnya.³

Menurut penulis partisipasi yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam memberikan ide-ide atau pendapatnya sehingga ia berpengaruh terhadap orang lain. Sedangkan menurut Gross Masson dan Mc Eachem yang dikutip oleh David Barry mendefinisikan partisipasi sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁴ Sarjono Arikunto memberi arti partisipasi sebagai perilaku individu atau lembaga yang punya arti bagi struktural sosial.⁵

Menurut penulis berdasarkan beberapa pengertian di atas, partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi orang tua selama ini dengan sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat/orang tua sebagai *stake holder* yang berkepentingan dengan pendidikan.

³ Sorjono Soekanto, *op.cit.*

⁴ David Barry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1984), h.268

⁵ Sarjono Arikunto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : UI Press, 1982), h.148

2. Konsep Pendidikan Agama Islam

Sebelum membahas pengertian pendidikan Agama Islam, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan arti pendidikan pada umumnya. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan "pe" dan akhiran "kan" mengandung arti perbuatan (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie*, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah*, yang berarti pendidikan.⁶

Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁷

Dari semua defenisi itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada anak didik, demi terciptanya insan kamil. Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendidikan agama Islam. Adapun kata Islam dalam istilah pendidikan Islam menunjukkan sikap pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang

⁶ H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004) Cet ke-4, h.1

⁷ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-maarif, 1981), cet ke-5, h. 19

memiliki warna-warna Islam. Untuk memperoleh gambaran yang mengenai pendidikan agama Islam, berikut ini beberapa defenisi mengenai pendidikan Agama Islam.

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁸

Menurut Husub Al-Makhzaji dan Jarj Jarin yang dikutip oleh Hafi Anshari pendidikan adalah usaha untuk memberikan bimbingan terhadap persiapan-persiapan hidup dari anak dalam kehidupannya. Tidak ada seorangpun yang tidak melakukan hal itu kepada anak-anaknya untuk memberikan persiapan-persiapan pada masa depannya. Namun demikian pendidikan itu dan kita semua dan dilaksanakan didalam arena lembaga formal Panti Asuhan / sekolah untuk kehidupan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebut pula pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

⁸ *Ibid.* h. 23

⁹ Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya; Usaha Nasional), 1982, h 28

kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁰

Rumusan konsep pendidikan mencerminkan gagasan tentang prinsip-prinsip suatu sistem pendidikan yang akan dilaksanakan didalamnya tercakup dasar alat materi, metode, evaluasi, tujuan yang akan dicapai bentuk kelembagaan.

Karena itu dengan memperhatikan batasan-batasan pendidikan tersebut ada beberapa hal pengertian dasar yang perlu dipahami yaitu pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus menerus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu, bila anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila maka ia sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya.

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, pendidikan Agama Islam adalah:

“ Pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.”¹¹

¹⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, (Jakarta; Sinar Grapika), 2003, h 2

¹¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), cet ke-2, h.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal, sehingga terbentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam. Adapun fungsi Pendidikan Islam menurut Hassan Langgulung sebagai berikut :

1. Fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman
2. Fungsi Psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak yang mengangakat manusia kederajat yang lebih sempurna.
3. Fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain atau masyarakat, dimana masing masing menyadari hak dan kewajibanya untuk menyusun masyarakat yang harmonis dan seimbang.¹²

3. Konsep Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Madrasah Tsanawiyah yang biasa di singkat dengan (MTs) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama (DEPAG). Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, dari mulai kelas 7 hingga kelas 9.

Murid kelas 9 diwajibkan untuk mengikuti Ujian Nasional (dahulu dikenal dengan EBTANAS) yang mempengaruhi kelulusan siswa.

¹² Langgulung, Hasan, *Manusia dan pendidikan suatu anaisis pendidikan psikologi, filsafat dan pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1995), h.178

Lulusan dari sekolah madrasah tsanawiyah dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi yaitu Madrasah Aliyah (sedereajat) dan ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun pula.

Pelajar sekolah madrasah tsanawiyah umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yaitu madrasah ibtdaiyah/ sederajat selama 6 tahun dan madrasah tsanawiyah/sederajat selama 3 tahun.

Kurikulum pada madrasah tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam misalnya mata pelajaran Bahasa Arab, al-Qur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Kalau dicermati istilah madrasah dari aspek *derivasi* kata, maka madrasah merupakan *isim makan* dari kata *darasa* yang berarti belajar. Jadi, madrasah berarti tempat belajar bagi siswa atau mahasiswa umat Islam. Karenanya, istilah madrasah tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit tetapi juga bisa dimaknai rumah, istana, *kuttab*, perpustakaan surau, masjid dan lain-lain. Bahkan seorang ibu bisa juga dikatakan sebagai madrasah pemula.¹³

Dalam sejarah pendidikan Islam makna madrasah tersebut memegang peranan penting sebagai institusi belajar umat Islam selama pertumbuhan dan perkembangannya. Sebab pemakaian istilah

¹³Abdul Hamid al-Hasyimi, *Arrasulu Arabiyul Murrabiyu.*(Riyad, 1985.) h 20

Madrasah secara defenisi baru muncul pada abad ke-11 penjelmaan istilah madrasah merupakan transformasi dari mesjid ke madrasah. Ada beberapa teori yang berkembang seputar proses transpormasi tersebut antara lain. George Mardiksi menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari mesjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung. Sedangkan Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa transformasi mesjid ke madrasah terjadi secara langsung. Karena disebabkan oleh konsekwensi logis dari semakin ramainya kegiatan yang dilaksanakan di masjid yang tidak hanya kegiatan ibadah dalam arti sempit namun juga pendidikan, politik, dan sebagainya.¹⁴

Dari pengertian diatas dapatlah kita pahami pemaknaan madrasah bukan dalam konteks etimologi akan tetapi dapat kita memaknai madrasah itu dalam konteks terminologi artinya adalah bahwa interpretasi dari arti madrasah itu berbeda-beda sebagaimana kami paparkan diatas, akan tetapi yang intinya adalah proses pembelajaran baik ia yang bersipat formal maupun non formal.

Dalam pengertian umum, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah muncul dan berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. madrasah telah mengalami jenjang dan jenisnya seiring dengan perkembangan bangsa sejak masa kesultanan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Perkembangan

¹⁴ Suwito dan Fauzan, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2005), h. 214

tersebut telah merubah pendidikan dari bentuk awalnya seperti pengajian di rumah-rumah, langgar, mushalla, dan masjid menjadi lembaga formal sekolah seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini.

Demikian juga dari segi materi, telah terjadi perkembangan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan, kalau sebelumnya hanya mengaji al-Qur'an dan ibadah praktis, melalui sistem madrasah, materi pelajaran mengalami perubahan seperti tauhid, hadis tafsir, dan bahkan bahasa Arab. Bahkan madrasah kemudian mengadopsi pelajaran-pelajaran umum sebagaimana sekolah-sekolah dibawah kepemimpinan Departemen Pendidikan Nasional.¹⁵

Perkembangan madrasah identik dengan perkembangan pondok pesantren. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran Islam dilaksanakan di pondok pesantren. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Ia lahir pada abad 20 dengan munculnya madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909.¹⁶ Dengan konsep dikotomi keilmuan yang masih kuat, maka kualitas pendidikan Islam pada awal perkembangannya di Indonesia menjadi pendidikan kelas dua setelah pendidikan umum. Bahkan hal ini terus berkembang sampai saat ini, meskipun sebenarnya sejak masa Menteri Pendidikan

¹⁵ Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005) h33

¹⁶ Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. (Bandung: Mizan, 1998) h 56

Malik Fajar, telah diupayakan adanya kesetaraan antara pendidikan madrasah dengan pendidikan umum. Jadi madrasah bukan lagi sekolah umum yang bercirikan Islam, sebagaimana konsep yang dilontarkan pada masa Menteri Agama Tarmizi Taher, tetapi madrasah adalah sama dengan sekolah umum, hanya induknya saja yang berbeda, yaitu Depag dan Diknas yang istilah sekarang dikenal dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut, menurut Karl Sternbrink meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren.
- b. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat.
- c. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya¹⁷. Di dalam salah satu

¹⁷ *Ibid* h 59

diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Menurut analisa penulis, pendidikan Islam sekarang ini dihadapkan pada tantangan kehidupan manusia modern. Dengan demikian, pendidikan Islam harus diarahkan pada kebutuhan perubahan masyarakat modern. Dalam menghadapi suatu perubahan, diperlukan suatu disain paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru.

Menurut Kuhn, sebagaimana dikutip oleh H.A.R.Tilar, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan. Untuk itu, pendidikan Islam perlu didisain untuk menjawab tantangan perubahan zaman tersebut, baik pada sisi konsepnya, kurikulum, kualitas sumberdaya insaninya, lembaga-lembaga dan organisasinya, serta mengkonstruksinya agar dapat relevan dengan perubahan masyarakat tersebut.¹⁸

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun demikian perhatian pemerintah terhadap

¹⁸ H.A.R. Tilar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Tera Indonesia, Magelang, 1998), Cet. I, h 78

keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai "*forgotten community*". Pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan *Center for Informatics Data and Islamic Studies CIDIES* Departemen Agama dan data base EMIS (*Education Management Syatem*) Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah Madrasah Ibtidaiyah/MI SD, Madrasah Tsanawiyah/MTs SMP dan madrasah Aliyah/MA SMA sebanyak 36.105 madrasah, tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren. Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri.

Pada saat ini ada sekitar 40.000 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Data 2007 menunjukkan bahwa terdapat 23.517 Madrasah Ibtidaiyah, 93% adalah milik swasta. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 12.054, 90% adalah milik swasta. Madrasah Aliyah berjumlah 4.687, 86% adalah milik swasta. Sebagai perbandingan, Sekolah Dasar yang dimiliki swasta hanya 6%. Kondisi fisik dan mutu madrasah swasta itu kebanyakan tidak memuaskan.¹⁹

Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena

¹⁹ Salahuddin Wahid, *Reorientasi Makna Pendidikan Pesantren Bagi Pembentukan Karakter Keilmuan Dan Keislaman Santri*, (Jakarta : Rosdakrya, 1999), h 56

keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah.²⁰ Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup, bahkan sering disebut *lâ yamûtu walâ yahya* tidak hidup dan perlu banyak biaya agar tidak mati. Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5, 5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia.

4. Konsep Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (disingkat SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Dasar / sedereajat. Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai ke kelas 9. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini lebih dikenal dengan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Murid kelas 9 diwajibkan untuk mengikuti Ujian Nasional (dahulu dikenal dengan EBTANAS) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan

²⁰ Tobroni, *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah*, artikel, 2007. h 78

dari sekolah menengah pertama dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (sedereajat) dan ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun pula.

Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yaitu Sekolah dasar/sederajt selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama/sederajat selama 3 tahun.

Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya dibawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara structural sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

5. Konsep Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan Agama

Konsep partisipasi masyarakat terhadap sekolah berbasis agama, terutama madrasah, dilihat dari aspek *historis-filosofis*, justru mendapat tempat khusus bagi masyarakat Muslim, dari tahun ke tahun. Konsep partisipasi yang belakangan dikembangkan ini dianggap terlambat. Muhaimin, menyebutkan bahwa dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh

dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat muslim itu sendiri. Sehingga madrasah sebenarnya sudah menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) dengan partisipasi masyarakat sebagai pilarnya. Indikatornya madrasah sampai saat ini masih tetap eksis, karena landasan filosofis berdirinya didorong oleh spirit agama dalam rangka pengembangan ajaran Islamiyah. Hingga saat ini kurang lebih 90% jumlah madrasah yang masih eksis di Indonesia adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta. Sedangkan sisanya berstatus negeri.²¹

Ada pun menurunnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam "madrasah" dewasa ini, lebih disebabkan oleh hegemoni politik kekuasaan. Baik hegemoni politik global, regional, nasional, maupun lokal. Hegemoni politik global dan regional dapat ditandai dengan pengambil alihan kekuasaan sebesar-besarnya oleh Barat, dan hegemoni nasional dan lokal dapat ditandai dengan pelarangan aktivitas pendidikan Islam dari Hindia Belanda hingga Orde Baru yang ditandai dengan keluarnya Inpres SDN No.10/1973 tentang pengambil alihan "kepemilikan" sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah. Tantangan-tantangan yang besar ini lah, yang dihadapi madrasah dalam perjalanan sejarahnya.

Dampak Inpres membuat lembaga pendidikan Islam menjadi kurang percaya diri, karena dianggap sekolah nomor dua. Bersekolah di madrasah

²¹ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.180

karena di sekolah negeri tidak diterima. Dan ini masih terasa hingga saat ini. Sehingga kedepan akan terjadi sebaliknya jika sekolah-sekolah Islam berbenah meningkatkan mutu layanan, mutu proses, dan mutu keluaran.

Esensi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan financial. Dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, sekali lagi, yang dibutuhkan adalah peningkatan etensitas dan ekstensitas hubungan sekolah dengan masyarakat.

E. Mulyasa berpendapat, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan ;

- a) Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak.
- b) Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup penghidupan masyarakat.
- c) Menggairahkan masyarakat untuk menjalani hubungan dengan sekolah.²²

Selanjutnya E. Mulyasa mengemukakan, jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggungjawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.²³

²² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), 2005, h

²³ Ibid, h 51

6. Manajemen Mutu dan Sekolah Efektif

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.²⁴

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa) dan sumberdaya selebihnya (pealatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala

²⁴ E. Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 157.

mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring serta evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik. Sehingga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah,

lomba-lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, kesenian, olahraga, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.²⁵

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri.²⁶ Dalam sebuah institusi mutu merupakan agenda utama dalam mempromosikan sebuah institusi dengan demikian meningkatkan mutu adalah tugas yang sangat penting. Dalam *Total Quality Management* (TQM) mutu bukanlah sekedar inisiatif lain. Mutu merupakan sebuah filosofis dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.²⁷

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral dalam pendidikan nasional, terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dalam satuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menyadari hal itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

Meskipun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan mengindikasikan bahwa berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 158

²⁶ Edwar Sallis, *Total Quality Management in Education*, alih bahasa Dr. Ahmad Ali Riyadi, *Total Qualiti Manajemen*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2008), hlm. 29.

²⁷ *Ibid*, hlm. 33.

belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut lebih diperparah lagi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang telah berkembang menjadi krisis multidimensional, dan telah memperburuk berbagai bidang kehidupan termasuk menurunnya mutu pendidikan.

Kondisi tersebut telah mengundang berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan ahli pendidikan dan para guru. Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan belum mengalami peningkatan secara merata. Ketiga faktor tersebut adalah:²⁸

Pertama, kebijakan dan penyelenggara pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya terpenuhi, maka mutu pendidikan secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam

²⁸ E. Mulyasa, *op. Cit.*, hlm. 159-160

menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik telah mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang memiliki jalur yang sangat rumit dan panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan.

Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).

Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, melalui manajemen yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Menandai suatu lembaga atau instansi yang bermutu diperlukan pembuktian melalui produk yang dihasilkannya. Pembuktian terhadap pendidikan bukanlah hal yang mudah karena sifatnya yang *intangible* maka perlu adanya jaminan terhadap kualitas pendidikan. Tolok ukur bagi jaminan kualitas (*quality assurance*) pendidikan lebih diapresiasi sebagai efektifitas sekolah. Dengan demikian, berbicara efektifitas sekolah tidak dapat dipisahkan dengan mutu sekolah.

Mutu sekolah adalah mutu semua komponen yang ada dalam system pendidikan, artinya efektifitas sekolah tidak hanya dinilai dari hasil semata, tetapi sinergitas berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bermutu. Sebagaimana dikatakan Sallis sebagai berikut:

1. Rencana strategis memberikan visi jangka panjang yang diwujudkan dalam program yang bersifat operasional dalam menentukan pasar dan corak budaya yang diinginkan.
2. Kebijakan mutu yang memberikan pola standar program utama yang berisi pernyataan tentang hak-hak peserta didik.
3. Organisasi mutu sebagai wadah kegiatan dalam mengatur, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan program.
4. Metode penyampaian kurikulum ditetapkan dengan rinci untuk setiap aspek program.
5. Bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik yang terintegrasi dengan pelaksanaan kurikulum.
6. Manajemen belajar di organisasi sesuai dengan spesifikasi materi kurikulum.

7. Desain kurikulum termasuk dokumentasi tujuan dan sasaran dari setiap spesifikasi program harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat pemakai.
8. Pengangkatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kependidikan yang sesuai dan terarah pada kompetensi profesional dan karier staff selanjutnya.
9. Monitoring dan evaluasi yang kontinu melalui mekanisme dan metode yang sesuai dengan proses terhadap kemajuan prestasi individu dan keberhasilan program.
10. Pengaturan administratif yang mendokumentasikan segala bentuk dokumen mengenai peserta didik termasuk sistem finansialnya yang valid.
11. Sistem review lembaga yang dapat membangun kepercayaan dan sekaligus mengevaluasi performa lembaga secara keseluruhan serta umpan balik bagi perencanaan strategi selanjutnya.²⁹

Sallis dalam tolok ukur jaminan kualitas menempatkan visi sebagai jaminan pertama bagi kualitas pendidikan karena visi memegang peranan penting dalam pengembangan sekolah. Disamping itu Sallis menegaskan bahwa pemimpin pendidikan membutuhkan kualifikasi sebagai berikut:

1. Visi dan simbol. Kepala sekolah harus mengomunikasikan nilai-nilai lembaga pada staffnya, siswa dan masyarakat luas.
2. *For the kids*. Dalam konsep pendidikan diartikan sebagai “dekat dengan pelanggan.”

²⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), hlm. 258.

3. Otonomi, percobaan, dan dukungan pada kegagalan. Kepala sekolah harus menganjurkan adanya inovasi pada stafnya dan menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi kemungkinan yang timbul.
4. Ciptakan perasaan kekeluargaan. Kepala sekolah perlu menciptakan rasa kekeluargaan dan memasyarakatkannya pada siswa, orang tua, guru, dan staf lainnya.
5. Rasa kesatuan, irama, keinginan, intensitas, dan antusias. Hal tersebut merupakan kualitas personal yang diperlukan oleh pemimpin pendidikan.

Ditinjau dari manajemen organisasi karakteristik sekolah efektif dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu aspek manajemen kelembagaan, layanan pembelajaran, yang diorientasikan kepada *learning organization*, dan aspek kompetensi siswa.

1. Manajemen kelembagaan

Aspek manajemen kelembagaan ini menekankan pada pemberdayaan sekolah (madrasah) sebagai pusat pembelajaran, pendidikan dan pembudayaan sekolah (madrasah). Manajemen kelembagaan sekolah adalah tinjauan sekolah efektif dari sudut penataan yang dilakukan kepala sekolah terhadap bidang-bidang garapan sekolah, yaitu kesiswaan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan dan kemitraan sekolah dengan masyarakat.

a. Kesiswaan

Siswa akan belajar dengan efektif bila kurikulum dikembangkan secara *gradual* (bertahap) berdasarkan kebutuhan dan kepentingan siswa. Siswa yang memiliki masalah dalam perilakunya merasa tersisihkan jika kurikulum yang

diajarkan kepada mereka tidak didesain sesuai dengan kebutuhan mereka, dan, terlebih lagi jika peraturan-peraturan sekolah (madrasah) tidak disusun secara *fair* dan efektif dengan melibatkan mereka.³⁰

Sekolah efektif ditinjau dari manajemen kesiswaan adalah diperolehnya siswa yang siap belajar dan dibuat beberapa rencana strategis dan operasional tentang kesiswaan untuk pembelajarannya, serta untuk pengembangan aspek keagamaan, kesehatan, kesenian dan hubungan sosialnya.

Manajemen kesiswaan dimulai saat siswa masuk sekolah dengan melalui seleksi yang adil dan jujur, rekrutmen dan pembinaan terhadap siswa, serta melaksanakan layanan bimbingan dan konseling bagi pemecahan masalah (problem solving) peserta didik.

Manajemen sekolah yang efektif bagi bidang kesiswaan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kecerdasan, minat dan bakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan untuk menegakkan disiplin siswa. Indikator bahwa siswa telah di manaj dengan baik adalah diperolehnya siswa yang memiliki grade yang cukup bahkan lebih dari cukup, siswa aktif mengikuti kegiatan di sekolah, prestasi akademik maupun ekstrakurikuleranya baik, tidak bolos, tidak tinggal kelas, dan tidak drop out.

b. Manajemen ketenagaan

Manajemen ketenagaan adalah upaya menata para personel sekolah dalam keahlian dan hubungan sosialnya, mulai dari personel diterima bekerja sampai kepada pengembangan kariernya. Kepala sekolah tidak hanya memusatkan diri

³⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta: 2004), hlm. 28-29.

untuk pembinaan dan pengembangan keahlian personel, tetapi kepuasan kerja personel menjadi pertimbangan pokok dalam menetapkan kebijakan sekolah tentang pembinaan personel.

Manajemen keahlian guru diarahkan pada kemampuan profesional guru untuk menyelenggarakan pembelajaran, sedangkan manajemen sosialnya lebih diarahkan pada bagaimana guru memiliki kematangan sosial maupun emosional dalam berinteraksi dengan siswa dan personel.

c. Manajemen kurikulum

Adanya pengorganisasian kurikulum yang dapat berupa analisis kurikulum yang dijabarkan ke dalam komponen-komponen GBPP dan silabus. Dengan banyaknya inovasi dalam kurikulum, kepala sekolah dituntut untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan melalui melalui reorientasi dan restrukturisasi kurikulum terutama dalam silabus dan implementasinya.³¹

Mempersiapkan peserta didik yang memiliki berbagai kompetensi pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi, antara lain berupa ketrampilan motorik/manual, kemampuan intelektual, sosial dan emosional.

Kepala sekolah ditantang untuk mewujudkan inovasi kurikulum melalui peningkatan relevansi kurikulum dengan program *life skills* sebagai salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum. Dalam implementasinya pengembangan *life skills* meliputi ketrampilan hidup yang relevan yang dipelajari

³¹ Hendyat Soetopo & Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Subtansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993), hlm. 45.

sekolah setelah menyelesaikan satuan program belajar tertentu, bahan belajar yang harus dipelajari agar ketrampilan hidup tersebut dikuasai siswa agar benar-benar dikuasai siswa yang mempelajarinya, sarana dan prasarana pendukung kepemilikan ketrampilan yang diinginkan, dan indikator keberhasilan peserta didik yang mengikutinya.

d. Manajemen sarana prasarana

Manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelajaran. Manajemen sarana oleh kepala sekolah meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, ketersediaan sumber belajar bagi siswa, pemanfaatan sumber belajar oleh siswa, serta penataan ruangan-ruangan yang dimiliki.

Sekolah yang sarana-prasasarananya di-manaj dengan baik akan berbeda dengan sekolah yang sarana-prasasarananya kurang di-manaj dengan baik. Sarana yang di-manaj akan menampilkan kenyamanan, keindahan, kemutakhiran, dan kemudahan dalam penggunaannya.

e. Manajemen keuangan

Penataan keuangan sekolah harus didasarkan pada keadilan dan tranparansi. Keuangan sekolah meliputi penggalian sumber-sumber dana pendidikan, pemanfaatan dana, dan pertanggungjawabannya. Dalam mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber maka pihak sekolah harus benar-benar bisa mengelola keuangan secara rinci cermat, dan teliti. Dalam hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mengembangkan sekolah.

Sebelum tahun anggaran berjalan, Kepala Sekolah harus sudah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Rencana anggaran pendidikan tersebut berisi seluruh rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran sekolah dan disusun oleh kepala sekolah bekerjasama dengan para guru, staff dan komite sekolah.

f. Manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat

Masyarakat merupakan mitra untuk mengembangkan sekolah. Sekolah tidak dapat maju pesat tanpa bantuan masyarakat. Oleh karena itu, kemitraan dengan masyarakat harus terus terjalin. Manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat mengakomodasi kepentingan-kepentingan sekolah kepada masyarakat dan sebaliknya. Realisasinya dapat berupa terwujudnya program kemitraan dalam dewan sekolah/komite sekolah dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah.

2. Layanan Pembelajaran

Layanan pembelajaran merupakan aspek utama organisasi sekolah. Sekolah yang efektif senantiasa responsif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Layanan pembelajaran merupakan urusan utama sekolah yang menjadi patokan, terjadi atau tidaknya perubahan kemampuan siswa sebagai representasi dari upaya-upaya yang dilakukan guru dan manajemen sekolah.

Oleh karena itu, layanan pembelajaran sekolah efektif ditujukan pada penciptaan sekolah sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*). Organisasi pembelajar (*learning organization*) adalah organisasi yang

memberikan fasilitas belajar bagi anggota-anggotanya dan melakukan perubahan-perubahan secara terus menerus sebagai respon terhadap kebutuhan, harapan dan aspirasi dari orang-orang, baik yang ada di dalam maupun di luar organisasi yang selalu berubah. Organisasi pembelajar (*learning organization*) adalah organisasi yang efektif karena misinya selaras dengan misi sekolah efektif, yaitu terjadinya belajar secara kontinu dan selalu mengedepankan keterlibatan seluruh personel untuk belajar dalam berbagai tingkat. Yang mempunyai karakteristik diantaranya:

- a. Organisasi pembelajar memiliki budaya dan seperangkat nilai yang mendorong belajar, dengan indikator yang tampak adalah;
 - 1) Keterbukaan terhadap pengalaman;
 - 2) Tidak menghindari dari kesulitan;
 - 3) Kemauan untuk menelaah kegagalan dan mau belajar darinya.
- b. Strategi organisasi menyatakan bahwa belajar merupakan sumber keunggulan strategi yang mantap (*sustainable strategic advantage*).
- c. Organisasi belajar mempunyai memiliki struktur organisasi yang fleksibel.
- d. Sistem informasi dalam organisasi pembelajar sangat akurat, tepat waktu, tersedia untuk siapa pun yang membutuhkannya dan dalam bentuk yang mudah untuk dipergunakan.
- e. Pemimpin organisasi pembelajar adalah pembelajar.³²

3. kompetensi siswa

Kompetensi siswa adalah kemampuan siswa yang dihasilkan selama dia mengikuti pembelajaran, artinya seberapa jauh siswa menyerap materi yang

³² Aan Komariah, Cepi Triatna, *op. Cit.*, hlm. 65.

disampaikan guru, seberapa persen tujuan yang telah ditetapkan guru dapat dikuasai siswa, dan seberapa baik siswa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan kinerja yang ditunjukkannya dalam memecahkan masalah-masalah belajar dari kehidupan.³³

Kompetensi terbentuk dari lima karakteristik sebagaimana dikatakan spencer dan spencer (1993), yaitu watak, motif, konsep diri, pengetahuan, dan ketrampilan. Kompetensi pengetahuan dan ketrampilan adalah kompetensi yang mudah dinilai, diberikan, dilatihkan, diajarkan, dialami, dan dikembangkan karena merupakan kompetensi yang berada di permukaan yang cenderung dapat di lihat.

Diknas (2001) mengategorikan kecakapan hidup dalam lima pilar, yaitu

- a. Kecakapan mengenal diri (*self awareness*), yang juga sering disebut kemampuan personal (*personal skills*);
- b. Kecakapan berpikir rasional (*thinking skills*);
- c. Kecakapan sosial (*sosial skills*);
- d. Kecakapan akademik (*akademic skills*);
- e. Kecakapan vokasional/khusus (*vocational skills*);

Lima pilar tersebut dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu *general life skills*, yaitu kecakapan mengenal diri, berpikir rasional, dan kecakapan sosial. Sedangkan kecakapan akademik dan vokasional dikategorikan sebagai *spesifik life skills*.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Interaksi Belajar Mengajar* (Jakarta: 2004), hlm. 10-11.

7. Bersaing dengan Peningkatan Mutu

Setidaknya terdapat lima sifat layanan yang harus diwujudkan agar pelanggan puas, di antaranya:³⁴

- 1) Keterpercayaan (*reliability*); layanan sesuai dengan yang dijanjikan;
- 2) Keterjaminan (*assurance*); mampu menjamin kualitas layanan yang diberikan;
- 3) Penampilan (*tangible*); iklim sekolah yang kondusif;
- 4) Perhatian (*emphaty*); memberikan perhatian penuh kepada peserta didik;
- 5) Ketanggapan (*responsiveness*); cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik.

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim mengidentifikasi ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu:

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya.
4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.

³⁴ E. Mulyasa, *op. Cit.*, hlm. 156.

5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya.
6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.³⁵

³⁵ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 54-55.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan Study Perbandingan antara Partisipasi Masyarakat Terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 06, adanya penelitian terdahulu dapat dibandingkan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan permasalahan tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 06, ini pernah dibahas dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa UIN Suska Riau antara lain :

Penelitian yang dilaksanakan oleh **NARIMIN**, mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Prodi Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2005 menulis Tesis dengan judul “ **Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak**”. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan di MTs Hidayatullah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, strategi MTs Hidayatullah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan langkah-langkah evaluasi yang dilakukan MTs Hidayatullah terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan seting penilaian di MTs Hidayatullah dan lingkungan masyarakat setempat di mana sekolah berada. Pengumpulan data yang dilakukan melalui

observasi, wawancara, analisis dokumen, dan diskusi. Sedangkan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan di MTs Hidayatullah sangat beragam, yakni partisipasi dalam anggota BP3, sebagai jamaah pengajian rutin yang dilaksanakan MTs Hidayatullah, dan partisipasi dalam kegiatan lain yang ada di Mts Hidayatullah.

Sementara itu penelitian yang dilaksanakan oleh **Ibrahim** yaitu Mahasiswa Pascasarjana UIN SUSKA RIAU Prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2009 menulis Tesis dengan judul “*Pola Pengelolaan Pendidikan dalam system Pendidikan Nasional (Studi Perbandingan di SMA Persada dan SMAN Kecapatan Rupa Kabupaten Bengkalis*” tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang pola-pola pendidikan dalam system Nasional pendidikan dan dilihat dari Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Penelitian yang dilaksanakan oleh **Zuriyah Latief**, mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Prodi Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2008 menulis Tesis dengan judul “**Partisipasi warga Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Pondok Pesantren Darussalam Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir**”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat lebih mendalam tentang partisipasi warga sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MTs Pondok Pesantren Darussalam Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini diawali dengan melihat pemahaman warga sekolah terhadap konsep-konsep dasar MBS. Selanjutnya penulis mencermati sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap Implementasi MBS kemudian penulis mengamati bagaimana transparansi dan partisipasi warga sekolah dalam Implementasi MBS.

Hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan menunjukkan : 1) Pemahaman warga sekolah terhadap konsep MBS rendah, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun dari pihak sekolah, belum ada penelitian secara khusus dan ketidak tahuan mereka terhadap MBS. 2) Sosialisasi pihak sekolah masih rendah, hal ini disebabkan oleh kesenjangan informasi, kebingungan akan tugas baru, kurangnya sumber daya pendidikan dan sulitnya koordinasi. 3) Transparansi dan akuntabilitas warga sekolah belum memuaskan, pihak sekolah tampak belum bersedia menerima atau menampung aspirasi dari warga sekolah. 4) Tingkat partisipasi warga sekolah dalam Implementasi MBS belum maksimal, tampaknya partisipasi belum dibungkus dengan semangat Interaktif yang intensif baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Sementara usaha-usaha yang dilakukan MTs Pondok Pesantren Darussalam dalam meningkatkan pemahaman warga

sekolah terhadap Implementasi MBS adalah dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi.

Diharapkan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah bukan saja dalam hal pendanaan yang selama ini dirasakan namun diharapkan peran aktifnya dalam proses pendidikan dan membuat kebijakan kepada pihak sekolah (Kepala sekolah beserta pembantu-pembantunya) harus memanfaatkan dan meningkatkan kewenangan, kekuasaan dan keluasan sehingga perencanaan program dapat berjalan maksimal menuju Implementasi MBS sebagaimana yang diharapkan.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan “suatu konsep dan penjabaran dari konsep teoritis agar mudah dipakai dan sekaligus sebagai aturan di lapangan penelitian, guna menghindari kesalahfahaman.”³⁶ Adapun indikator dalam penelitian yaitu: *Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah* ;

1. Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Ide atau Gagasan Untuk Kemajuan Sekolah
2. Tanggapan Masyarakat Untuk Memasukkan Anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

³⁶ Wahyu, MS dan Muhammad MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), h.88

3. Partisipasi Masyarakat dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Kepala Sekolah dan Guru-guru
4. Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Sumbangan Materi dan Tenaga
5. Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Operasional Sekolah
6. Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Pembangunan Insfratruktur Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang
7. Masyarakat Ikut Serta dalam Diskusi/Musyawahah yang Dilaksanakan di Sekolah
8. Partisipasi Masyarakat Untuk Menghadiri Undangan yang Diberikan Sekolah
9. Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Pengawasan Bagi Siswa Di Lingkungan Sekolah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul *Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6* dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan \pm 10 bulan dari bulan Maret 2012 s.d Nopember 2012 dengan perincian waktu sebagai berikut:

1. Bulan April 2012 pembuatan, perbaikan, dan seminar proposal.
2. Bulan April-Oktober 2012 pembuatan laporan penelitian dan pelaksanaan penelitian
3. Bulan Oktober 2012-Januari 2013 perbaikan-perbaikan dari dosen pembimbing.
4. Bulan Februari 2013 munaqasyah

B. Metode Pembahasan

Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, karena penulis meneliti kejadian yang kini sedang berlangsung, yaitu perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu

pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Selatpanjang Kepulauan Meranti.

2. Library research, yaitu penelitian kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah tesis ini seperti: buku-buku, majalah, koran, dan sebagainya.
3. Field research, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan:
 - a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat dan komite sekolah yang dapat memberikan data yang diperlukan.
 - c. Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.
 - d. Angket, yaitu teknik penelitian dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah guna mendapatkan data yang lebih akurat.

Tujuan penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara deskriptif tentang Study Perbandingan Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan judul.

1. Responden Penelitian

Secara sederhana kata Responden memiliki makna “penjawab” (atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian). Maka responden adalah orang (satu atau lebih) yang menjadi objek dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan sesuai dengan apa yang menjadi keperluan peneliti.

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Wali Murid / masyarakat MTs Negeri dan SMP Negeri 06, Kepala MTs Negeri dan Kepala SMPN 06, Komite MTs N dan Komite SMP N 06, Majelis Guru MTsN dan Majelis Guru SMPN 06 yang ada di Selatpanjang kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang didapatkan di lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

b. Data Skunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data berupa buku-buku, literatur, artikel, buku digital pdf, yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

- a. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Jika wawancara dilakukan dengan komunikasi secara lisan, maka dalam angket komunikasi tersebut dilakukan secara tertulis.¹ Maka angket yaitu Menyebarkan sejumlah pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan. Pada instrumen angket ini telah dirumuskan oleh penulis sebanyak 15 item pertanyaan yang akan dijawab oleh responden untuk mendapatkan jawaban secara tertulis tentang konsep operasional yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan dalam bentuk lisan kepada sample yang telah ditentukan.² Pada teknik wawancara ini penulis ingin menemukan permasalahan yang berkenaan dengan Peran masyarakat akan pendidikan madrasah

¹ Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : CV. Ilmu, 1975), hal. 55

² Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.135.

dan umum. Pada instrument ini penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden berdasarkan konsep operasional yang telah penulis tetapkan sebelumnya untuk mendapatkan secara langsung jawaban yang penulis ajukan berdasarkan indikator-indikator dan penulis kembangkan lagi secara terbuka. Irawan mengemukakan bahwa wawancara yang digunakan dalam penelitian merupakan metode utama bagi peneliti untuk mengumpulkan data.³

Menurut Moh. Nasir wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara).⁴

Mulyana mengemukakan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁵

Suharsimi Arikunto mengungkapkan wawancara adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu- persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa

³ Prasetya Irawan, *Analisa Data Kualitatif*, (Bandung; Gramedia), 1994, h 315

⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia), 1988, h 126

⁵Mulyasa, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung; Rosda Karya), 2002, h 210

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁶

Selanjutnya Kartini mengemukakan bahwa melalui metode wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif, maka peneliti dapat memperoleh informan secara luas.⁷ Koentjoroningrat mengemukakan bahwa beberapa manfaat wawancara dalam penelitian kualitatif adalah ; 1) peneliti dapat menggali hal-hal yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian; 2) peneliti dapat menggali keadaan masa lampau, sekarang dan yang akan datang.⁸

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi (*document study*) yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, sejarah kehidupan (*life histories*), film, karya seni, dll.⁹ Melalui teknik Dokumentasi ini penulis mencari dengan meminta kepada kepala sekolah masyarakat data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis yang dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian penelitian ini. Teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang ada dalam bentuk bahan jadi yang telah dimiliki oleh sekolah untuk menjadi perbandingan dan penguat penelitian. Pedapat Bogdan dan Biklen yang dikutip Munandar menegaskan bahwa bahan yang ditulis subjek sendiri juga

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Sistem*, (Jakarta;Rineka Cipta), 1998,h 32

⁷ Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung; Mandar Maju), 1980,.

⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta; PT. Gramedia), 1993, h 59

⁹ Suharsimi Arikunto, op. Cit. hal.112

dipergunakan sebagai data, seperti barang-barang otobiografi, surat pribadi, buku harian, memo, tambahan rapat, warkat berita, dokumen kebijaksanaan, buku tahunan, selebaran berita, buku catatan, catatan berupa-rupa, surat pembaca, karangan disurat kabar, arsip pribadi, dan catatan kasus siswa.¹⁰

Menurut Mulyana dokumentasi adalah gambaran mengenai pengalaman hidup dan penafsiran atas pengalaman hidup dilengkapi dengan data yang diperoleh lewat wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.¹¹ Moleong mengemukakan dokumen adalah catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul penulis kualifikasikan atau tuangkan kedalam bentuk angka-angka, sehingga data tersebut bersifat kuantitatif, untuk selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif. Pengalihan data kedalam bentuk kuantitatif ini ditempuh dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Dengan Keterangan : P = Persentase

F = Frekuensi Responden

¹⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang; YAI), 1990. h 81-82

¹¹ Mulyana, *Op Cit.*, h 67

$$N = \text{Total Jumlah.}^{12}$$

Untuk menganalisa data. Di sini penulis akan melalui proses-proses pelaksanaan sebagai berikut: (1), pengumpulan data, maksudnya adalah mengumpulkan berbagai jawaban dari responden sesuai dengan populasi dan sampel yang telah ditetapkan yang berkenaan dengan masalah-masalah dan variabel penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. (2) seleksi data, maksudnya adalah setelah data terkumpul dari responden yang sesuai dengan populasi dan sampel yang telah ditetapkan, maka data tersebut diperiksa kembali untuk menghindari terjadinya kekeliruan.(3) klasifikasi dan tabulasi data, maksudnya adalah setelah data selesai diseleksi maka data tersebut dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi atau kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisa dan interpretasi data, maka penulis menentukan skala persentase sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Skala Persentase

No	Persentase	Penafsiran
1	81% - 100%	Selalu
2	61 %- 80%	Sering
3	41% - 60%	Jarang
4	0 % - 40%	Tidak Pernah

¹² Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Cet. Ke-11, h. 40

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N)

1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N)

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti di Negerikan berdasarkan Surat keputusan menteri Agama Republik Jendral Nomor : 224 Tahun 1993, dengan sejarah singkat sebagai berikut:

1. Berdiri pada Tanggal 13 Pebruari 1953 atas Kesepakatan 8 Pemuka Masyarakat

a H. Wan Sulung	e. E. Ibrahim
b H. Muhammad	f. Said Ali
c E. Nontel	g. Sahrum JS
d TS. Hamzah	h. H. M. Yunus

Beralamat di Jalan Kartini No. 67 Selatpanjang.
2. 18 Oktober 1954 dioperasikan dengan nama SMP Islam Siswa Pertama 15 Putra 10 Putri
3. 20 April 1955 dikunjungi oleh Gubernur Ruslanmulyoharjo.
4. 1 Oktober 1955 diberi subsidi oleh Kementerian Agama dengan Kepala Sekolah Sunhaji nama PGAP bersubsidi.
5. 1 April 1964 meningkat menjadi PGA 6 Tahun dengan SKB 3 Menteri
Pada Tahun 1979 berubah MTs. Swasta & MAS Selatpanjang.

6. Dengan KMA No. 24 Tahun 1986 status menjadi MTs.N Pekanbaru Filial Selatpanjang, Kepala Filial Abu Bakar.
7. Dinegerikan dengan KMA No. 244 Tahun 1993, Kepala MTs.N Selatpanjang Pertama A. Karim Tayah.

MTs Negeri Selatpanjang terletak di Jalan Rumbia Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, memiliki lokasi yang strategis terletak ditengah jantung Kota Selatpanjang, dan merupakan Induk Kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah.

MTs N Selatpanjang sampai saat ini terus menerus meningkatkan posisinya sebagai Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, mempersiapkan SDM yang berkualitas, mandiri dan harapan orang tua , masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Visi

Terwujudnya MTsN Selatpanjang sebagai lembaga pendidikan Yang berkualitas dan unggul dipropinsi Riau.

3. Misi

- a. Membentuk sdm yang berwawasan, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa.
- b. Mewujudkan ketenagaan yang berkualitas, cerdas, loyal, kreatif dan inovatif.
- c. Mewujudkan kinerja guru dan karyawan yang profesional, solid dan harmonis.

4. Sarana –Prasarana

Berbicara mengenai sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1 dan 2 menyatakan:

Ayat 1: Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Ayat 2: Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana itu merupakan aspek pendidikan, aspek sosial, aspek individual, aspek kehidupan nyata dan aspek kegiatan masyarakat. Dengan berbagai peranan tersebut, maka gedung sekolah dapat menunjang pendidikan.

Menurut Suharsimi Ari Kunto yang termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung.¹

¹ Suryobroto, *Manajemen Pendidikan...*,h 114

a. Tanah dan Halaman

Tanah sekolah sepenuhnya milik Negara dalam hal ini di bawah Departemen Agama (LUAS Areal seluruhnya 5.434 M2) Keadaan Tanah MTs Negeri Selatpanjang

Status : Milik Negara

Luas Tanah : 5.434 M2

Luas bangunan : 3.557 M2

Luas Gedung : 2.271

b. Gedung sekolah

Tabel 1

Jumlah dan Luas Ruang MTs N Selatpanjang

No	Ruang	Jml	Luas (m ²)	Kondisi
1.	Ruang teori / kelas	17	1215	Baik
2.	Ruang Kepala TU	1	28	Baik
3.	Ruang Kepala madrasah	1	24	Baik
4.	Ruang Tamu	1	32	Baik
5.	Ruang Perpustakaan	1	108	Baik
6.	Ruang labor IPA	1	216	Baik
7.	Ruang Labor Komputer	1	81	Baik
8.	Musholla	1	90	Baik

9.	Bangsai Kendaraan	1	21	Baik
10.	Mendra / pompa air	1	16	Baik
11.	Rumah Penjaga	1	60	Baik
12.	WC guru	4	16	Baik
13.	WC Siswa	15	50	Baik
14.	Pagar	1	5.434	Baik

c. Sumber Belajar

1. Sarana Sumber Belajar

Perpustakaan merupakan pusat sumber Ilmu yang utama, maka di Perpustakaan MTs Negeri Selatpanjang di lengkapi dengan berbagai macam buku – buku yang ada, yang meliputi :

- a. Jumlah Buku Perpustakaan : 8. 907 eks
- b. Jumlah buku Pelajaran : 7.600 eks
- c. Jumlah Judul Buku : 250 eks
- d. Koran / Surat Kabar : tiap hari / surat kabar
- e. Majalah : -

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang tersedia meliputi :

- ❖ Perpustakaan

- ❖ Komputer 20 Unit berada di labor Komputer yang setiap saat dan setiap waktu di gunakan untuk pembelajaran siswadan internet.
- ❖ Kaset dan video Recorder
- ❖ Labor IPA di lengkapi dengan sound system
- ❖ 17 kelas untuk moving class
- ❖ TV di ruang majelis guru untuk menambah wawasan dan merupakan sumber informasi.
- ❖ LCD proyektor untuk menunjang proses belajar mengajar.
- ❖ Drum Band untuk kegiatan siswa
- ❖ Masjid Raya Darul Ullum sebagai sarana Ibadah dan kegiatan keagamaan / hari besar islam warga MTs Negeri Selatpanjang sekaligus sebagai Laboratorium kegamaan.
- ❖ Lapangan Volly ball
- ❖ Lapangan Basket
- ❖ CD pembelajaran
- ❖ 1 Ruang Bimbingan Konseling.
- ❖ Program Sistem Informasi Sekolah on line Via SMS
- ❖ Internet Spedy unlimet 24 jam

5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 1, 2, 3 dan 4:

Ayat 1 : Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ayat 2 : Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan Ijazah dan / atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3 : Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : (a) kompetensi pedagogik ; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; (d) kompetensi sosial.

Ayat 4 : Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikasi keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat di angkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.²

² Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Penerbit Citra Umbara: Bandung).

Jumlah seluruh personil sekolah sebanyak 43 orang , yang terdiri atas guru tetap 10 orang dan guru tidak tetap 25 orang, pegawai tetap 3 orang dan pegawai tidak tetap 5 orang, secara rinci di tampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Personil MTs Negeri Selatpanjang

No	Personil	Jumlah
1.	Pegawai tetap	4
2.	Pegawai tidak tetap	9
3.	Guru tetap	12
4.	Guru tidak tetap	27
Total		52

Tabel 3

Personil Pendidik MTs Negeri Selatpanjang

Pendidikan	Guru	Karyawan
SD	-	1
SMP	-	-
SMA	1	7
D1	-	-
D2	2	1
D3	6	2
S1	30	2
S2	-	-
TOTAL	39	13

Adapun Pimpinan Sekolah Yang Pernah Bertugas Di MTs Negeri Selatpanjang, sejak awal bertugas di MTs N Selatpanjang, sejak awal berdirinya di tampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Pimpinan Sekolah yang pernah bertugas di MTs Negri Selatpanjang.

No	Nama	Periode
1.	A. Karim Tayah	1993 – 2005
2.	Drs. Syaifuddin	2005 – 2010
3.	Efendi, S.Ag	2010 – Sekarang

Tabel 5

Keadaan Guru MTs Negeri Selatpanjang.

No.	Nama dan NIP	L / P	Jabatan	Gol	Gubid	Ijazah Terakhir
1	Efendi, S.Ag NIP. 196610211997031002	L	Ka.MTsN	IV.a	BP	S.1
2	Amir Dahlan NIP. 195112311986031006	L	GT/Kaur. Sarana	IV/a	BP	D.III
3	Hj.Yusraini Masrah NIP. 195109141979032001	P	GT	IV.a	BA/BP	D.III
4	Heny Kunhariati,S.Pd NIP. 197111132003122002	P	GT/W.Kls	III/b	PPKN	S.1
5	Zulfina Anizar,S.Pd NIP. 197911012005012008	P	GT/Kaur. Kesiswaan	III.b	B.Indonesia	S.1
6	Ermayani, S.Si NIP. 198005262005012010	P	GT/W.Kls	III.b	Biologi	S.1
7	Dra. Saidah NIP. 196601251996032001	P	GT/Kaur. Kurikulum	IV/a	MTK	S.1
8	Ummi Maulin Safitri, S.THI NIP.	P	GTT/W.Kls	III.a	B. Indonesia	S.1

	1504297090000000000					
9	Aisyah, S.Si NIP. 198311232009012009	P	GT/W.Kls	III.a	MTK	S.1
10	Drs. Husnan Nip. 196605032000031003	L	GT	III.a	BA	S.1
11	Suryadi, S.PdI NIP. 1504292750000000000	L	GT	III.a	IPS	S.1
15	Sri Nopita	P	GTT/W.Kls	-	MTK	D.II
16	Masnur,S.Ag	L	GTT	-	B. Arab	S.1
17	M.Fadir	L	GTT	-	PPKN/A.A	D.III
18	Yenny Pujawati,S.Ag	P	GTT/W.Kls	-	IPS/Fiqih	S.1
19	Nailil Amani, SE	P	GTT/W.Kls	-	IPS	S.1
20	Elwitta, S.Ag	P	GTT	-	A.Akhlak	S.1
21	Siti Huzaimah	P	GTT/W.Kls	-	SQ	SLTA
22	Drs.Ghalib Ahmad	L	GTT	-	Q. Hadits	S.1
23	Habbah, SE	L	GTT	-	IPS	S.1
24	Murniyati,A.Md	P	GTT/W.Kls	-	TIK	D.III
25	Erlin Susilawati,S.Ag	P	GTT/W.Kls	-	B.Indonesia	S.1
26	Elika Susanti	P	GTT	-	B. Inggris	D.III
27	Arif, S.Ag	L	GTT	-	SKI	S.1
28	Darmawati, S.HI	P	GTT	-	Fiqih	S.1
29	Febria Triska, A.Md	P	GTT/W.Kls	-	TIK/KTK	D.III
31	Khuliya Nur Aini, S.S	P	GTT/W.Kls	-	B. Inggris	S.1

32	Titik Suhesti, S.PdI	P	GTT/W.Kls	-	KTK/QH	D.II
33	Syamsuardi, S.Pd	L	GTT/W.Kls		Penjas	S.1
34	Eva Asmihartati, SP	P	GTT/W.Kls	-	Mulok	S.1
35	Sri Supriyanti, S.Pd	P	GTT	-	B.Indonesia	S.1
36	Nelda Hefni, S.Pd	P	GTT/W.Kls	-	IPA	S.1
38	Dessi Aftikarita, ST	P	GTT	-	Fisika	S.1
39	Nursyamsiah, S.Pd	P	GTT	-	B. Inggris	S.1
41	Zamzamah, S.Pd	P	GTT	-	MTK	S.1
42	Herlinda , S.Pd	P	GTT	-	B. ING	S.1

6. Keadaan Siswa

Siswa merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya bagi kelangsungan proses belajar mengajar disekolah, karena siswa merupakan generasi yang akan menerima pendidikan itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1,2 dan 3 berbunyi :

Ayat 1 berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak;

a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e) pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f) menyelesaikan pogram pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas, waktu yang ditetapkan.

Ayat 2 berbunyi setiap peserta didik berkewajiban; a) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b) ikut menanggung biaya penyelenggaran pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3 berbunyi warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³Data siswa selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

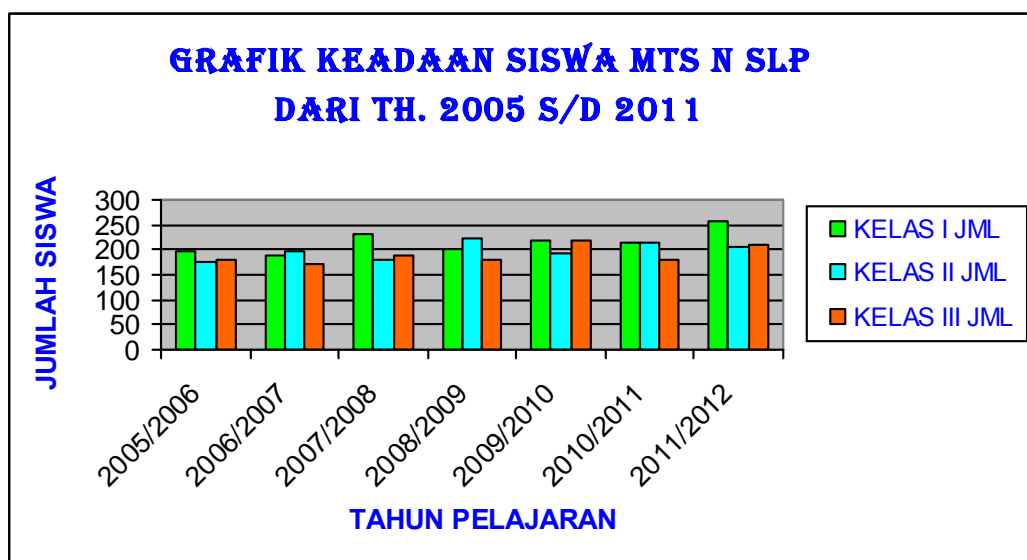
³ Undang –undang No 20 Tahun 2003 Tentag Sistem Pendidikan Nasional

Tabel 6

Data Keadaan Siswa MTs Negeri Selatpanjang Tahun 2005 s/d 2013

No	TAHUN PELAJARAN	KELAS I			KELAS II			KELAS III			TOTAL			KET
		L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	L	P	JM L	
1.	2005/2006	104	95	199	83	93	176	81	98	179	268	286	554	
2.	2006/2007	86	101	187	96	102	198	80	91	171	262	294	556	
3.	2007/2008	112	118	230	93	89	182	100	90	190	305	297	602	
4.	2008/2009	97	103	200	108	115	223	91	90	181	296	308	604	
5.	2009/2010	90	130	220	88	103	191	104	115	219	282	348	630	
6.	2010/2011	110	103	213	90	125	215	83	99	182	283	327	630	
7.	2011/2012	119	139	258	106	100	206	86	126	212	311	365	676	
8.	2012/2013	163	162	325	113	134	247	104	94	198	380	390	770	

Grafik Keadaan Siswa Berdasarkan Kelas Dari tahun 2005 / 2013



7. Kurikulum

Kurikulum merupakan pedoman bagi para praktisi pendidikan terutama guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting karena ia sebagai acuan bagi para guru untuk bagaimana menyampaikan materi pelajaran yang telah diamanahkan kepadanya agar tujuan sekolah dan pendidikan bisa terealisasi. Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri di Selatpanjang dan SMPN 06 mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), disamping itu juga telah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di terapkan tahun pelajaran 2011/2012. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini akan dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya.⁴

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah pilihan yang dianggap mampu menjawab tantangan –tantangan perkembangan zaman. Karena KTSP di rancang untuk menggali segala potensi yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Otoritas pengembangannya diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan dengan landasan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional.

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi

⁴ Dokumentasi MTs N Selatpanjang

Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang di susun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Standar nasional pendidikan terdiri atas: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah pada khususnya, MTs Negeri Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi lembaga pendidikan tingkat dasar memandang perlu untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Melalui KTSP ini sekolah dapat melaksanakan program pendidikannya sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam pengembangannya melibatkan seluruh warga sekolah dengan berkoordinasi kepada *stakeholder* di lingkungan sekitar sekolah.

Dalam dokumen ini dipaparkan tentang Kurikulum MTs Negeri Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi , yang secara keseluruhan mencakup:

a) Struktur dan muatan kurikulum, yang meliputi :

1. Struktur kurikulum

2. Muatan kurikulum

- Mata pelajaran (wajib dan pilihan)
- Muatan lokal
- Pengembangan diri
- Pengaturan beban belajar
- Ketuntasan belajar
- Kenaikan kelas dan kelulusan

b) Kalender pendidikan;

c) Silabus, dan

d) Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Dalam peraturan Pemerintah RI no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 8 dan 9 berbunyi :

Pasal 8

Ayat 1 : Kedalam muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Ayat 2 : Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Ayat 3 :Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

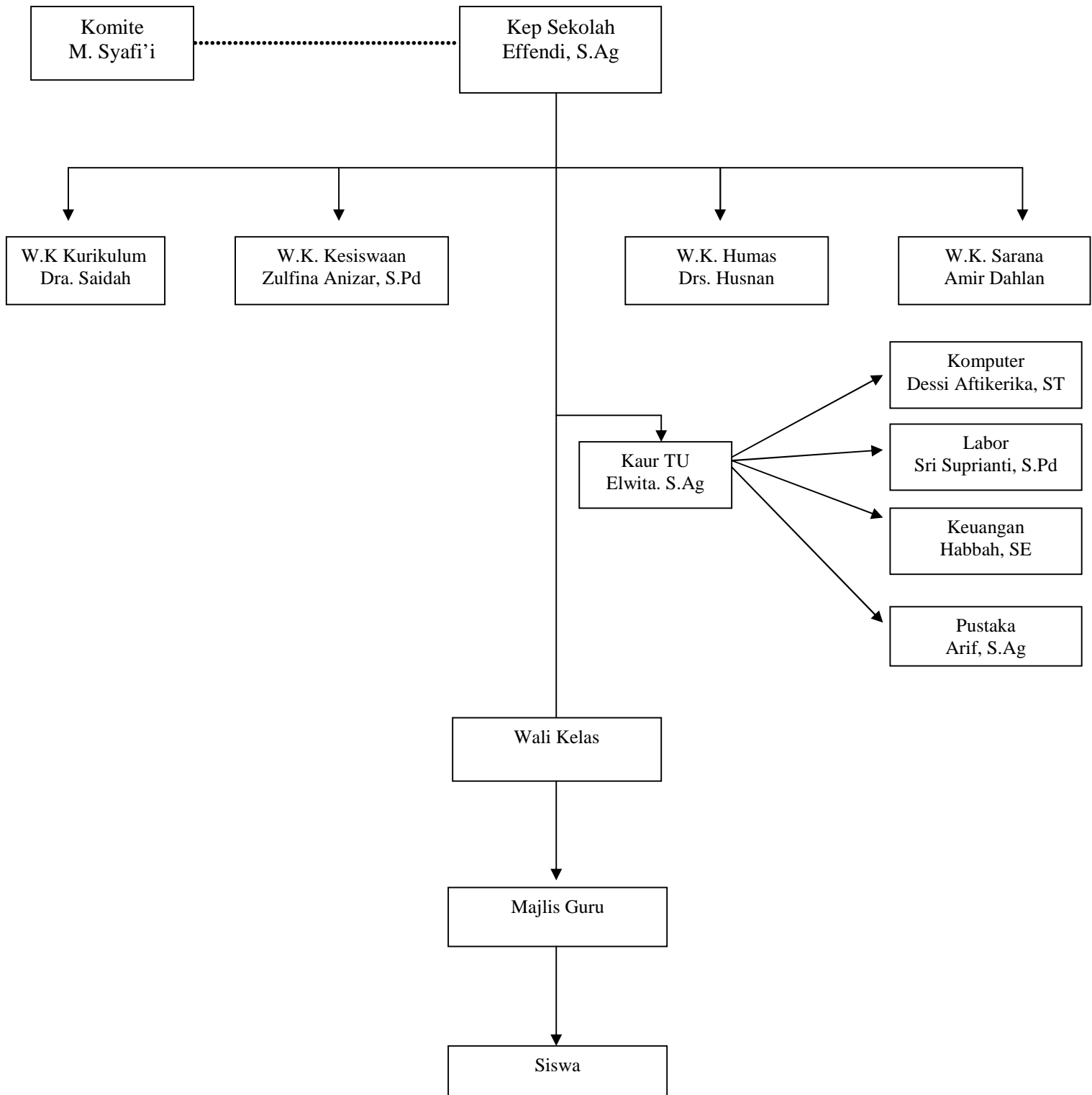
Ayat 1: Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

Ayat 2 : Kurikulum tingkat satuan pendidikan wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

8. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan administrasi sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur struktur organisasi sekolah:

- 1.) Memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk menyelenggarakan organisasi secara optimal.
- 2.) Dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah.
- 3.) Diputuskan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah.

Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

B. Gambaran Umum Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 Tebing Tinggi Selatpanjang.

1. Identitas Sekolah

SMP Negeri 06 Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beralamat di jalan Ibrahim No. 05 Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Sumarno, S.Pd .

2. Visi Sekolah

Adapun yang menjadi visi Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 Tebing Tinggi adalah Berilmu, Kreatif dan mampu berkompetensi berdasarkan iman dan takwa.

3. Misi Sekolah

- a. Meningkatkan prestasi belajar anak, baik kurikulum maupun ekstra kurikulum.
- b. Meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar.
- c. Mengembangkan potensi anak, sesuai bakat dan kemampuan.
- d. Menumbuh kembangkan sikap inovatif, kreatif dan kompetitif.
- e. Kooperatif antar sekolah, orang tua, maupun dengan instansi terkait.
- f. Berkompetensi secara baik didalam maupun diluar sekolah.

4. Sarana dan Prasarana

a. Keadaan Ruang

Tabel 7
Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah SMP N 6 Tebing Tinggi

No	Ruang	Ada/ Kondisi Ruangan			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Ruang Kepala Sekolah	-	-	-	-
2	Ruang Guru	-	-	-	-
3	Ruang Tata Usaha	-	-	-	-
4	Ruang Belajar Teori/ Kelas	7	2	-	9
5	Ruang Perpustakaan	-	-	-	-
6	Ruang Laboratorium Biologi	-	-	-	-
7	Ruang Laboratorium Fisika	-	-	-	-
8	Ruang Aula/ Serba Guna	-	-	-	-
9	Ruang Komputer	-	-	-	-
10	Ruang UKS	-	-	-	-
11	Ruang BP	-	-	-	-
12	Ruang Kantin	-	-	-	-
13	Ruang Olah Raga	-	-	-	-
14	Kamar Mandi	1	1	-	2

b. Keadaan Meubiler

Tabel 8
Keadaan Meubiler SMP Negeri 6 Tebing Tinggi

No	Ruang	Ada/ Kondisi Ruangan			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Meja Siswa	40	10	50	100
2	Kursi Siswa	80	20	10	110
3	Meja Guru	10	2	2	12
4	Kursi Guru	8	3	3	14
5	Lemari	3	2	1	6
Jumlah		141	37	66	244

5. Keadaan Siswa

Tabel 9
Keadaan Siswa dan Rombel SMP Negeri 6 Tebing Tinggi

Keadaan Siswa	Tahun Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
	2009 /2010	31	25	36
	2010/ 2011	18	24	25
	2011/2012	12	18	24
	2012/2013	35	15	18
Jumlah Rombel	2006/2007	2	2	2
	2007/2008	2	2	2
	2009/2010	1	1	2
	2010/2011	1	1	1

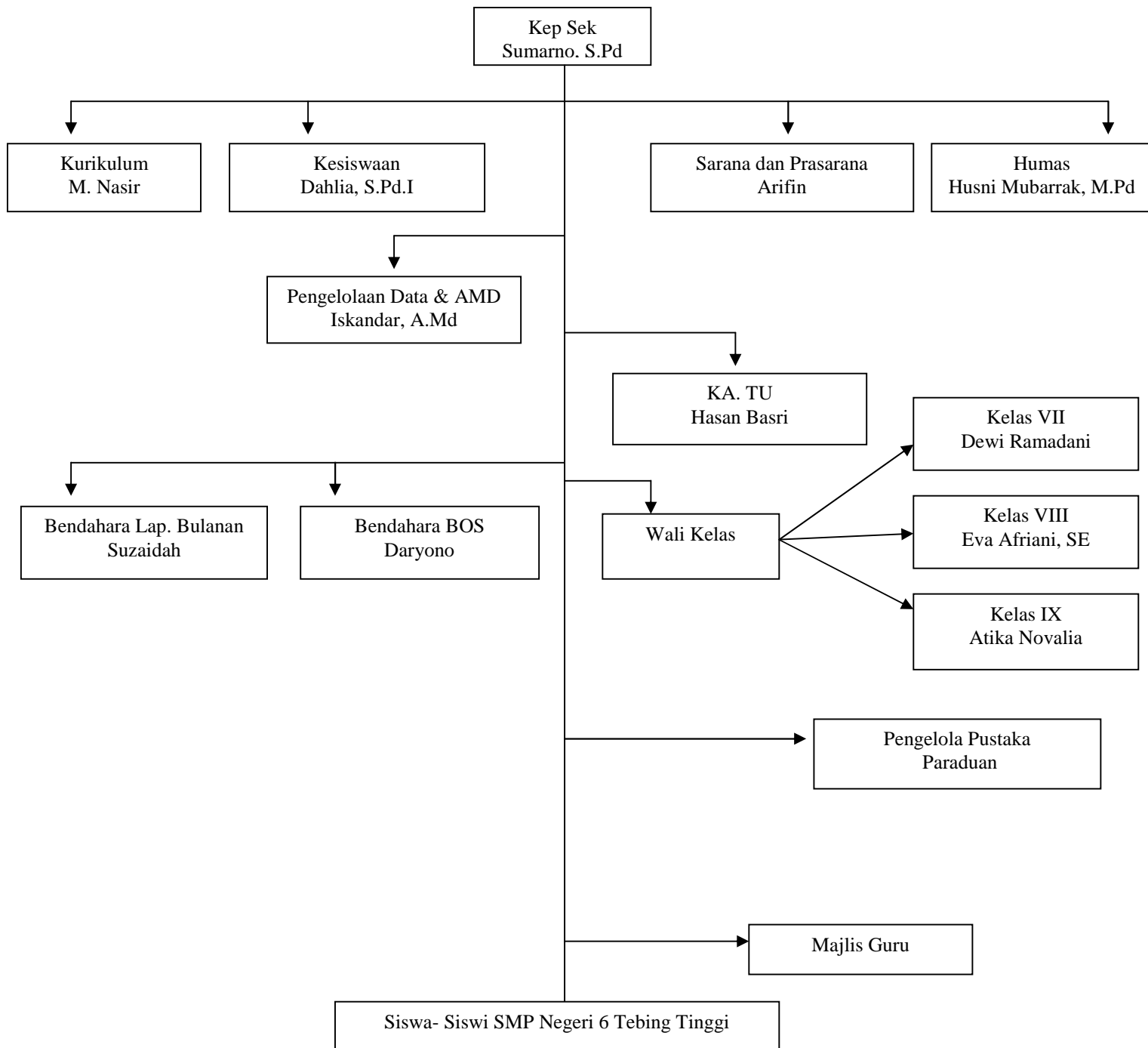
6. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tabel 10

Keadaan Guru-guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing tinggi
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	NAMA	L/P	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Sumarno, S.Pd	L	Kepala Sekolah	S1
2.	Ahmad, S.S	L	Guru B. Indonesia	S1
3.	Siti Rohmaniah	P	Guru Matematika	D III
4.	Ezawaty, SE	P	Guru Ekonomi	S1
5.	Azlina	P	Guru Biologi	D III
6.	Nurkamisah, S.Ag	P	Guru Geografi	S1
7.	Suryani, S.Pd I	P	Guru PPKN	S1
8.	Husni Mubarak, S.Ag	L	Guru Agama	S1
9.	Afriani, S.Pd	P	Guru B. Indonesia	S1
10.	Lendrawati	P	Guru B. Inggris	D II
11.	Oce Indratmo, A.Md	L	Guru Penjas	D III
12.	Dahlia, S.Pd	P	Guru KTK/ Budra	S1
13.	Daryono	L	Tata Usaha	SMK
14.	Martin Farianto	L	Tata Usaha	SMA
15.	Iskandaria, A.Md	L	Tata Usaha	D III
16.	Arifin	L	Tata Usaha	SD
17.	Denny Budi Gunawan	L	Tata Usaha	SMA

6. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang



7. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang

Sekolah menyusun KTSP yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi. Kerangka KTSP mencakup :

1.) Kelompok Mata Pelajaran

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) kelompok mata pelajaran estetika; 5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.

a.) Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan didalam sekolah maupun diluar sekolah.⁵ Memang masih banyak diantara kaum pendidik (guru) yang berpandangan tradisional mengenai kurikulum ini. Kurikulum terdiri atas mata pelajaran tertentu yang bertujuan menyampaikan kebudayaan lampau sejumlah pengetahuan yang harus diajarkan kepada anak-

⁵ B. Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta; PT. Rineka Cipta), 2004, h 32

anak, karena seringnya pengetahuan ini di ambil dari buku-buku pelajaran tertentu yang dipandang baik maka kurikulum ditentukan oleh buku pelajaran.⁶

Kurikulum adalah proses penciptaan kurikulum standar bagi prestasi peserta didik secara jelas. Dengan kurikulum standar, sekolah akan mampu menciptakan programnya sendiri dengan mempertimbangkan identitas, aspirasi, dan minat guru.⁷

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.

⁶ Ibid., h 33

⁷ Suparno Eko Widodo, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Ardadizya Jaya), 2011, h 30

b.) Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut;

- 1.) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- 2.) Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu ; a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) belajar untuk memahami dan menghayati; c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain; e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- 3.) Pembinaan Kurikulum Pendidikan Menengah Pertama
 - a.) Tujuan

Tujuan pendidikan SMP merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional yang terdiri atas: 1) mendidik siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke lembaga

pendidikan yang lebih tinggi; 3) memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki kehidupan dimasyarakat.⁸

b.) Materi, Pendekatan Proses Belajar Mengajar dan Penilaian.

Program pendidikan pada kurikulum SMP terdiri atas; 1) *Program Pendidikan Umum*. Program pendidikan umum terdiri atas ; Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesenian; 2) *Program Pendidikan Akademi*. Terdiri atas bidang studi; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Matematika; 3) *Program Pendidikan Keterampilan*. Program ini hanya satu bidang studi yaitu bidang studi Pendidikan Keterampilan yang wajib diikuti oleh semua siswa serta disajikan dalam bentuk paket-paket keterampilan dan diberikan dalam satu semester untuk satu jenis paket yang dipilih.⁹

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Fakta kajian dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data guna untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁸ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru), 1988, h 85

⁹ Ibid, h 86

Sewaktu mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu kuesioner/ angket yang penulis jadikan sebagai metode pokok untuk memperoleh data yang ditujukan kepada masyarakat/ wali murid. Sedangkan untuk mencari data pendukung penulis menggunakan wawancara yang ditujukan kepada kepala sekolah, komite sekolah dan guru-guru dijadikan sebagai data pendukung untuk memperoleh data tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data yang telah terkumpul melalui wawancara, penulis sajikan dalam bentuk narasi kemudian data dari angket, penulis sajikan dalam bentuk tabel dan prosentase. Dari uraian yang telah disajikan, supaya pembaca mudah untuk memahami tabel tersebut, maka penulis gunakan simbol F (Frekwensi) dan P (Prosentase). Adapun data yang bersifat kualitatif dijadikan data kuantitatif dan klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. 0 % - 40% = Tidak Pernah
- b. 41% - 70% = Jarang
- c. 71% - 80% = Sering
- d. 81% -100% = Selalu

Data tentang partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian-uraian sebagai berikut;

1. Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Ide atau Gagasan Untuk Kemajuan Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang, yaitu Bapak Effendi, S.Ag pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

“Masyarakat memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan sekolah pada saat kami mengadakan rapat dengan wali murid dan juga dihadiri komite sekolah”

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi'i sebagai Komite MTs Negeri Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

“Partisipasi masyarakat sangat antusias dalam perkembangan kemajuan sekolah namun hanya masyarakat tertentu saja yang memahami kemajuan sekolah ini”

Kemudian penulis wawancara dengan ibu Heny Kunhariati sebagai komite MTs Negeri Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan sekolah adalah dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat lain bukan dari lingkungan tempat tersebut, untuk dapat memasukkan anaknya kesekolah ini dan sama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban sekolah ini”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 1 yaitu ibu Siti Huzaimah pada tanggal 8 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Partisipasi masyarakat hanya sebagian kecil saja karena banyak masyarakat yang tidak ambil peduli terhadap sekolah ini”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 2 yaitu ibu Dra. Saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan

“Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan sekolah ini”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Waka Humas yaitu bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan ide atau gagasan dalam memajukan sekolah”

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan Madrasah Tsanawiyah Negeri Selat Panjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	a. Selalu	23	19,16 %
	b. Sering	23	19,16 %
	c. Kadang-kadang	34	28,33%
	d. Tidak pernah	40	33,33 %
	Jumlah	120	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Selalu” sejumlah 23 orang (19,16 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 23 orang (19,16 %), yang menjawab “Kadang-kadang” sejumlah 34 orang (28,33 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 40 orang (33,33 %). Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa partisipasi dari masyarakat masih jarang dalam memberikan ide atau masukan untuk pengembangan sekolah karena banyak dari masyarakat tidak mau peduli tentang keberhasilan pendidikan khususnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri.

2. Tanggapan Masyarakat Untuk Memasukkan Anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu Bapak Effendi,S.Ag pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

“Berdasarkan pemantauan saya sebagai kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri ini bahwa tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini sangat bagus sehingga kapasitas lokal tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, hal ini dapat dilihat pada tahun ajaran 2012/2013 kami hanya menargetkan sekitar 250 siswa, ternyata tanggapan masyarakat jauh dari target kami yaitu sekitar 370 siswa yang mendaftar.”

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi'i sebagai Komite MTs Negeri Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

“Bisa dikatakan Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang adalah sekolah yang difavoritkan bagi orang tua untuk memasukkan anaknya di sekolah ini, terbukti jumlah pendaftaran awal Tahun Ajaran 2012/2013 melebihi kapasitas yang ada, dari target kami hanya 250 siswa , rupanya begitu banyak yang ingin memasukkan anaknya ke tsanawiyah sehingga kami menerima sekitar 370 siswa.”.

Kemudian penulis wawancara dengan ibu Heny Kunhariati Sebagai komite MTs Negeri Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

“Tanggapan Masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini sangat baik sekali karena anak cenderung memilih sekolah yang

bersifat agama dan juga tanggapan orang tua sangat mendukung agar anaknya masuk disekolah yang banyak mata pelajarannya yang agama”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 1 yaitu ibu Siti Huzaimah pada tanggal 8 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya kesekolah ini sangatlah baik sehingga lokal-lokal tidak mencukupi untuk anak dan juga orang tua sangat antusias memasukkan anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri ini, sehingga penerimaan jauh diatas target hanya sekitar 250 siswa, bahkan yang mendaftar lebih dari 350.”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 2 yaitu Dra. Saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Berdasarkan pemantauan saya selama saya mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri ini tanggapan orang tua dalam memasukkan anaknya kesekolah ini sangat bagus sekali dan juga antusiasnya masyarakat menyekolahkan anaknya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang ini”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Berdasarkan pemantauan saya bahwa tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya di Madrasah Tsanawiyah Negeri ini sangat baik terbukti dengan banyaknya siswa yang setiap tahun mendaftarkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri ini”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 4 yaitu ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Partisipasi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini meningkat lebih dari 40 %”.

Penjelasan di atas sesuai dengan angket yang penulis sebarakan dengan responden atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12

Tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
2.	a. Sangat Baik	61	50,83 %
	b. Baik	21	17,5 %
	c. Meragukan	16	13,33 %
	d. Tidak Baik	22	18,33 %
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab ” sangat baik” sejumlah 61 orang (50,83 %), yang menjawab “ baik” sejumlah 21 orang (17,5 %), yang menjawab “meragukan” sejumlah 16 orang (13,33 %), dan yang menjawab “Tidak baik” sejumlah 22 orang (18,33 %). Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang sangat baik dan antusias sekali sehingga kapasitas ruang tidak mencukupi untuk menampung banyaknya siswa yang masuk.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Kepala Sekolah dan Guru-guru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

” Dalam memajukan sekolah ini masyarakat dan majlis guru saling bekerja sama untuk keberhasilan sekolah ini”.

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi'i sebagai Komite MTs Negeri Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

” Kerjasama antara kepala sekolah, guru-guru dan masyarakat yaitu melalui musyawarah komite Sekolah oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat ini sangat membantu sekali untuk mencapai keberhasilan sekolah berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Siti Huzaimah Sebagai komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang pada tanggal 8 Agustus 2012 menyatakan:

” Berdasarkan yang saya ketahui yaitu dengan cara peduli terhadap lingkungan sekolah ini misalnya, dalam lingkungan tersebut ada masyarakat yang tertimpa musibah kita sebagai majlis guru atau kepala sekolah turut berduka cita dan menghadiri atau datang langsung ketempat yang berduka (meninggal atau menghadiri undangan lain)”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data yaitu melakukan wawancara dengan seorang guru ibu Dra. Saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Berdasarkan pemantauan yang saya lihat bahwa kepala sekolah jika ada panggilan atau undangan dia menghadiri atau datang”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Waka Humas yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Yang banyak menjalin hubungan ke masyarakat hanya pihak sekolah seperti menghadiri undangan, berkunjung ketempat musibah dan lain-lain”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Guru 3 yaitu Ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Hanya pihak sekolahlah yang sering melakukan jalinan dengan lingkungan sekolah (masyarakat) dengan cara kerja bakti mengundang dalam acara perpisahan sekolah dan lain-lain”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 4 yaitu ibu Nursyamsiah pada tanggal 16 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Hubungan antara kepala sekolah, guru-guru dengan masyarakat masih terjadi hubungan yang baik”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13

Partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan bapak kepala sekolah dan guru-guru

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
3.	a. Sangat berperan	11	9,16 %
	b. Berperan	15	12,5 %
	c. Cukup berperan	64	53,33 %
	d. Tidak berperan	30	25 %
	Jumlah	120	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Sangat berperan” sejumlah 11 orang (9,16 %), yang menjawab ” berperan” sejumlah 15 orang (12,5 %), yang menjawab “Cukup berperan” sejumlah 64 orang (53,33 %), dan yang menjawab “Tidak berperan” sejumlah 30 orang (25 %).

Menurut analisa penulis berdasarkan hasil dari wawancara dengan prosentase diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dan guru-guru masih kurang karena hubungan baik itu sangat perlu sekali untuk pengembangan sekolah dan keberhasilan pendidikan khususnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Dalam hal ini seharusnya kepala sekolah dan guru-guru hendaknya selalu berusaha untuk dapat bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber didalam masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program sekolah. Dengan memandang masyarakat itu sebagai laboratorium untuk belajar, berarti penting

bagi guru-guru untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang tersedia didalam masyarakat yang diperlukan didalam belajar, seperti minat masyarakat terhadap industri, pertanian, perikanan dan lain-lain.

4. Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan tenaga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

“ya ada, tetapi sumbangan yang diberikan masyarakat kepada sekolah ini seperti untuk membangun parkir kendaraan guru, mereka memberikannya berbentuk bahan baku, seperti semen, batu bata, pasir dan kayu”.

Pernyataan kepala sekolah ini dibenarkan oleh komite sekolah dengan bapak M. Syafi’i wawancara pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

“Ada, sumbangan yang masyarakat berikan tidak saja sumbangan fisik tetapi ada juga sumbangan pikiran, sumbangan fisik yang diberikan masyarakat seperti memberikan bantuan renovasi tempat parkir, dan juga renovasi tempat Wc siswa karena itu perlunya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Siti Huzaimah Sebagai komite MTs Selatpanjang pada tanggal 8 Agustus 2012 menyatakan:

“Kadang- kadang saja, karena ada masyarakat yang membantu bagi masyarakat yang mampu dan ada juga masyarakat yang tidak mau ambil peduli tentang memberikan sumbangan untuk kemajuan sekolah”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 1 yaitu ibu Dra. saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Tidak ada, masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 2 yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Tidak ada masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Guru 3 yaitu Ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Tidak ada, masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga”

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 4 yaitu ibu Nursyamsiah pada tanggal 16 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Menurut pemantauan saya belum terlihat lagi untuk sekarang ini masyarakat tidak ada memberikan sumbangan baik itu materi untuk membangun sekolah ini”.

Untuk membuktikan benar dan tidak benarnya data dari hasil wawancara diatas penulis juga menyebarkan angket kepada masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 14

Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan tenaga di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
4.	a. Selalu	17	14,16 %
	b. Sering	18	15 %
	c. Kadang - Kadang	26	21,66 %
	d. Tidak pernah	59	49,16 %
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Selalu” sejumlah 17 orang (14,16 %), yang menjawab ”Sering” sejumlah 18 orang (15 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 26 orang (21,66 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 59 orang (49,16 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat penulis analisa bahwa masyarakat ada sebagian yang menyumbangkan tenaganya kepada kesekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri selatpanjang ini.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Operasional Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu Bapak Effendi,S.Ag pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

” Ada yang tidak membantu dan ada juga yang membantu, karena tidak sebagian masyarakat yang mau membantu perkembangan sekolah ini tetapi ada juga yang mau membantu untuk operasional sekolah ini”.

Berdasarkan pernyataan dari kepala sekolah diatas kemudian penulis melakukan wawancara bersama komite sekolah dengan bapak M. Syafi'i wawancara pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

” Menurut pemahaman saya dalam hal ini masyarakat ada yang menyumbangkan barang-barang berupa kursi dan lain-lain”.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis melakukan wawancara dengan ibu Heny Kunhariati Sebagai komite MTs Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

”Ada sebagian masyarakat yang membantu kegiatan operasional sekolah ini,”

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data yaitu melakukan wawancara dengan seorang guru ibu Siti Huzaimah pada tanggal 8 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Menurut pemahaman saya dalam hal membantu operasional sekolah, ada juga masyarakat yang memberikan sumbangan untuk sekolah dan ada juga masyarakat yang tidak mau memberikan sumbangan disekolah ini, masyarakat yang mau membantu operasional sekolah ini seperti kursi, meja dan peralatan atau kebutuhan sekolah dan ada juga yang memberikan tumbuhan seperti penghijauan sekolah”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 2 yaitu ibu Dra. Saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Menurut saya dalam hal membantu operasional sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang ini boleh dikatakan tidak ada”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

”Masyarakat kurang berpartisipasi dalam membantu operasional sekolah”.

Pendapat yang diungkapkan kepala sekolah dan beberapa orang guru diatas maka penulis mencari informasi yang lebih akurat kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 4 yaitu ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Kurang berpartisipasi dalam membantu operasional sekolah”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15

Partisipasi masyarakat dalam membantu operasional Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
5.	a. Selalu	26	21,66 %
	b. Sering	19	15,83 %
	c. Kadang - Kadang	13	10,83 %
	d. Tidak pernah	62	51,66 %
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Selalu” sejumlah 26 orang (21,66 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 19 orang (15,83 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 13 orang (10,83 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 62 orang (51,66 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara diatas dapat penulis analisa bahwa masyarakat tidak ada yang membantu operasional sekolah, hal ini dapat diketahui bahwa dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 1,2 dan 3 menyatakan:

Ayat 1 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Ayat 2 : Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Ayat 3: Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Pembangunan Insfratraktur Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu Bapak Effendi, S.Ag pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

“Ada yang membantu, baik material maupun tenaganya untuk membangun gedung sekolah maupun rehabilitas sekolah”.

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi’i sebagai Komite MTs N Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

“Partisipasinya ada, tapi tidak semua masyarakat menanggapinya dengan kesadaran penuh, disebabkan image dan persepsi bahwa sekolah sudah memiliki bantuan yang lain”.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis melakukan wawancara dengan ibu Heny Kunhariati Sebagai komite MTs Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

“Sebagian masyarakat ada juga yang membantu infrastruktur sekolah bagi masyarakat yang mampu”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data yaitu melakukan wawancara dengan seorang guru ibu Siti Huzaimah pada tanggal 8 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Ada, seperti bantuan semen, ada juga bantuan yang berbentuk materi untuk perkembangan sekolah ini sehingga sekolah ini sedikit demi sedikit telah terpenuhnya fasilitas baik itu labor maupun musholla, dan lain-lain itu tidak terlepas dari peran masyarakat”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yaitu ibu Dra. Saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Ada yang membantu dan ada juga yang tidak membantu”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Ada yang membantu dan ada juga yang tidak membantu”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Partisipasi masyarakat dalam membantu infrastruktur sekolah ini ada”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16

Partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan insfratruktur Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
6.	a. Selalu	63	52,5 %
	b. Sering	28	23,33 %
	c. Kadang - Kadang	19	15,83 %
	d. Tidak pernah	10	8,33 %
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Selalu” sejumlah 63 orang (52,5 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 28 orang (23,33 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 19 orang (15,83 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 10 orang (8,33 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat penulis analisa bahwa peran dari masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sekolah sebagian besar ada karena di lihat dari perkembangan sekolah masyarakat juga ikut menyumbangkan dan membantu kebutuhan sekolah baik dalam bentuk bahan baku maupun material sehingga dengan demikian perkembangan sekolah nampak itu dikarenakan adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat.

Banyak orang mengartikan hubungan sekolah dengan masyarakat dalam arti sempit dan terbatas pada kepentingan anak. Dengan begitu apabila orang tua dan guru disekolah telah bersama-sama melakukan pendidikan, hubungan dianggap baik. Oleh karena itu banyak kepala sekolah yang menganggap cukup adanya hubungan sekolah dengan masyarakat jika sudah terbentuk BP3, yang sewaktu-waktu bisa dihubungi atau dijadikan perantara antara sekolah, keluarga dan dengan masyarakat jika terjadi sesuatu pada peserta didik. Sebenarnya hubungan sekolah dengan masyarakat mengandung arti yang sangat luas dan mencakup berbagai bidang yang menyangkup pendidikan anak dan masyarakat pada umumnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain dapat dilakukan dalam bidang pendidikan kesenian, olah raga, membantu infrastruktur, dan keterampilan.

7. Masyarakat Ikut Serta dalam Diskusi/Musyawarah yang Dilaksanakan di Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang pada tanggal 1 Agustus 2012 menyatakan :

“Ya ada, setiap kami dari pihak sekolah mengadakan musyawarah sering melibatkan Komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat, apalagi yang menyangkut masalah keuangan sekolah, pembangunan sekolah maupun masalah peraturan anak karena semua itu tidak terlepas dukungan dari orang tua murid atau masyarakat”.

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi'i sebagai Komite MTs Negeri Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

“Ada, sebagai komite disekolah ini saya sering diikut sertakan dalam hal apapun karena semua itu tidak terlepas dari dukungan pihak masyarakat oleh karena itu saya sebagai masyarakat sangat mendukung semua program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah”.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis melakukan wawancara dengan ibu Kun Hariati Sebagai komite MTs Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

” Iya ada, masyarakat yang ikut serta dalam diskusi yang dilaksanakan sekolah”

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data yaitu melakukan wawancara dengan seorang guru ibu Siti Huzaimah pada tanggal 8 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Selama saya menjabat sebagai guru disini kami dari pihak sekolah sering mengundang pihak dari masyarakat apabila kami mengadakan rapat mengenai sekolah ini”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 2 yaitu ibu Dra. saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Iya ada, dengan cara mengundang Komite Sekolah Sebagai perwakilan dari masyarakat”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Iya ada, dengan cara mengundang komite sekolah”.

Pendapat yang diungkapkan kepala sekolah dan beberapa orang guru diatas maka penulis mencari informasi yang lebih akurat kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 4 yaitu ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Ada, dengan cara melibatkan sebagian masyarakat”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Masyarakat ikut serta dalam diskusi/musyawarah yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang.

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
7.	a. Selalu	77	64,16 %
	b. Sering	21	17,5 %
	c. Kadang - Kadang	12	10 %
	d. Tidak pernah	10	8,33 %
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Selalu” sejumlah 77 orang (64,16 %), yang menjawab ”Sering” sejumlah 21 orang (17,5 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 12 orang (17,5 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 10 orang (8,33 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara diatas dapat penulis analisa bahwa sekolah juga mengikutsertakan masyarakat dalam diskusi/musyawarah yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang karena hubungan baik sekolah dengan masyarakat itu baik sehingga apabila pihak sekolah memberikan undangan untuk masyarakat mereka merespon dengan baik.

8. Partisipasi Masyarakat Untuk Menghadiri Undangan yang Diberikan Sekolah

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang dengan Bapak Effendi wawancara pada tanggal 1 Agustus 2012, ia mengungkapkan bahwa:

” Ya ada, Dalam menghadiri undangan yang diberikan hanya sebagian masyarakat yang mengikutinya”.

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi'i sebagai Komite MTs N Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

” Setiap undangan yang diberikan masyarakat sekitar 70 % mengikutinya seperti musyawarah komite sekolah, dan melibatkan anggota masyarakat”.

Kemudian untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis melakukan wawancara dengan ibu Heny Kunhariati Sebagai komite MTs Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

”Iya ada, masyarakat mengikuti undangan yang diberikan oleh Madrasah Tsanawiyah ini karna masyarakat juga ingin mengetahui perkembangan dan kemajuan madrasah Tsanawiyah ini”.

Kemudian untuk mendapatkan informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang guru diantaranya Ibu Dra. Saidah yang diwawancarai pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Menurut yang saya ketahui, yang mengikuti undangan yang diberikan sekolah masyarakat terus menghadirinya hanya sebagian masyarakat aja yang tidak mengikutinya”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husnan pada tanggal 13 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Undangan yang diberikan sekolah kepada masyarakat hanya sebagian masyarakat yang tidak menghadirinya, kebanyakan dari masyarakat pengen sekali mengetahui perkembangan-perkembangan dan kemajuan Madrasah Tsanawiyah ini”.

Pendapat yang diungkapkan kepala sekolah dan beberapa orang guru diatas maka penulis mencari informasi yang lebih akurat kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 4 yaitu ibu Titik pada tanggal 15 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Ya ada, masyarakat menghadiri undangan yang diberikan oleh sekolah ini karena itu hubungan antara kepala sekolah, guru-guru dengan masyarakat masih terjadi hubungan yang baik”.

Berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18

Partisipasi masyarakat untuk menghadiri undangan yang diberikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang.

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
8.	a. Selalu	81	67,5 %
	b. Sering	15	12,5 %
	c. Kadang - Kadang	11	9,16 %
	d. Tidak pernah	13	10,83%
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu ” sejumlah 81 orang (67,5 %), yang menjawab ”Sering” sejumlah 15 orang (12,5 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 11 orang (9,16 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 13 orang (10,83 %).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan hasil prosentase di atas dapat penulis analisa bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang bahwasanya masyarakat juga antusias menghadiri undangan yang diberikan oleh kepala madrasah tersebut dan juga masyarakat ingin mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan anak-anak mereka dimadrasah tersebut. Dan juga mereka ingin mengetahui perkembangan yang ada di madrasah tersebut.

9. Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Pengawasan Bagi Siswa Di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang dengan Bapak Effendi pada tanggal 1 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Masyarakat melakukan pengawasan dengan cara kerjasama dengan pihak sekolah dan lingkungan juga mendukung untuk kemajuan sekolah”.

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah penulis juga melakukan wawancara dengan bapak M. Syafi'i sebagai Komite MTs N Selatpanjang pada tanggal 3 Agustus 2012 menyatakan:

” Dengan cara melakukan pengawasan terhadap siswa yang membolos sekolah”.

Kemudian untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis melakukan wawancara dengan ibu Kun Hariati Sebagai komite MTs Selatpanjang pada tanggal 6 Agustus 2012 menyatakan:

” Dengan cara masyarakat melihat dari jauh tentang siswa-siswa yang ada membolos dari sekolah”.

Selanjutnya penulis melakukan triangulasi data yaitu melakukan wawancara dengan seorang guru ibu Siti Huzaimah pada tanggal 8 Agustus 2012 ia menyatakan:

” Iya ada, masyarakat memantau dari jauh tentang perilaku anaknya disekolah”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru 2 yaitu ibu Dra. Saidah pada tanggal 10 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Strategi masyarakat dalam pengawasan anak-anaknya ada, cukup memantau dari jauh dan masyarakat ikut serta dalam mengawasi siswa –siswi disekolah ini contoh pada jam belajar kalau ada siswa berada diluar atau dijalan maka ditegur”.

Berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan dengan wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 19
Partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan bagi siswa dilingkungan
Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
9.	a. Selalu	52	43,33 %
	b. Sering	39	32,5 %
	c. Kadang - Kadang	10	8,33 %
	d. Tidak pernah	19	15,83 %
	Jumlah	120	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu ” sejumlah 52 orang (43,33 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 39 orang (32,5 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 10 orang (8,33 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 19 orang (15,83 %).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru dan hasil persentase di atas dapat penulis analisa bahwa strategi masyarakat dalam mengawasi anak-anaknya ada berbagai strategi ada masyarakat yang mengawasi anak-anak atau siswa-siswa yang sekolah dilembaga tersebut dengan cara memantau dari jarak jauh dan ada juga masyarakat yang langsung melihat ke sekolah untuk perkembangan pendidikan anaknya.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Ide atau Gagasan Untuk Kemajuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang

Adapun mengenai partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang, penulis melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

“Partisipasi dari masyarakat dalam memberikan ide bagi sekolah ini masih jauh yang diharapkan karena sebagian masyarakat mereka tidak mengambil peduli dengan sekolah ini kadang-kadang kami dari pihak sekolah sering mengajak masyarakat dalam hal apapun demi kemajuan sekolah ini tapi hanya sebgaiian masyarakat yang mau menyumbangkan ide-idenya kepada sekolah ini”.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis juga melakukan wawancara dengan komite sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi bersama bapak Daryono pada tanggal 4 Agustus 2012 ia mengungkapkan bahwa:

“Menurut pemantauan saya belum mendukung sepenuhnya hanya sebagian saja yang peduli terhadap SMP Negeri 6 sehingga mau menyekolahkan anak-anaknya kesekolah tersebut”.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa guru yaitu ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Bahwa partisipasi dari masyarakat dalam memberikan ide belum nampak tetapi sekolah apabila ada rapat selalu mengikutsertakan masyarakat ”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“ Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide untuk kemajuan sekolah sangat baik, sehingga dalam menentukan kebijakan sekolah selalu melibatkan masyarakat ”.

Untuk memperoleh keabsahan informasi penulis juga melakukan wawancara dengan guru, ibu Nur Kamisah pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan:

“ Bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau masukan bagi sekolah ini masih kurang sehingga sekolah ini masih jauh dari keberhasilan dari tujuan, visi dan misi sekolah”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel beriku\

Tabel 20
Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1.	a. Selalu	11	18,33 %
	b. Sering	12	20 %
	c. Kadang-kadang	26	43,33 %
	d. Tidak pernah	11	18,33 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab ” Selalu” sejumlah 11 orang (18,33 %), yang menjawab “ Sering” sejumlah 12 orang (20 %), yang menjawab “Kadang-kadang” sejumlah 26 orang (43,33 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 11 orang (18,33 %). Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat masih jarang dalam memberikan ide atau masukan untuk pengembangan sekolah karna banyak dari masyarakat tidak mau peduli tentang keberhasilan pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi.

2. Partisipasi Masyarakat Untuk Memasukkan Anaknya Di SMPN 6 Tebing Tinggi

Mengenai partisipasi masyarakat memasukkan anaknya kesekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, penulis melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

” Dapat kita lihat bahwa tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini sangat kurang karena sekolah ini sarana dan prasarana masih kurang ”.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis juga melakukan wawancara dengan komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi bersama bapak Daryono pada tanggal 4 Agustus 2012 ia mengungkapkan bahwa:

” Dalam hal ini pihak sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin contohnya memberikan seragam gratis seperti putih baru dan memprioritaskan beasiswa bagi pendaftaran utama namun pihak masyarakat kurang merespon untuk memasukkan anak-anaknya dan anak-anak tersebut mengatakan fisik bangunan kurang bagus dan tidak bertingkat seperti SMP yang lain”.

Untuk mendapatkan informasi yang jelas kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa guru yaitu ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012 ia menyatakan :

” Tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah SMP Negeri 6 Tebing Tinggi ini sangatlah kurang sekali karena anak cenderung memilih tempat sekolah yang lain yang jaraknya tidak berapa jauh dari lingkungan sekolah ini dan juga masyarakat kurang respon untuk mendorong anak-anaknya masuk sekolah ini adapun respon dan sebagian masyarakat namun anaknya tidak mau masuk sekolah ini alasannya kurang bagus fisik bangunannya seperti sekolah dasar sedangkan SMP-SMP lainnya semua bertingkat ”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“ Tanggapan Masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini sebagian besar bagi orang tua yang merasa kurang mampu bila memasukkan anaknya ke sekolah lain baik dari segi materi ataupun kemampuan anak”.

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa pendapat diatas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kamisah untuk mendapatkan informasi yang jelas wawancara pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan :

“ Masyarakat kurang merespon untuk memasukkan anaknya kesekolah ini, meskipun pihak sekolah telah berusaha secara maksimal, seperti menggratiskan seragam biru putih, memberikan beasiswa, memperindah lingkungan, bahkan bekerja sama dengan pihak kelurahan namun tanggapan masyarakat masih belum baik untuk memasukkan anaknya ke SMP ini”.

Penjelasan di atas sesuai dengan angket yang penulis sebarakan dengan responden atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21

Tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya kesekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
2.	a. Sangat Baik	9	15 %
	b. Baik	12	20 %
	c. Meragukan	16	26,66 %
	d. Tidak Baik	23	38,33 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab ” sangat baik” sejumlah 9 orang (15 %), yang menjawab“ baik” sejumlah 12 orang (20 %), yang menjawab “meragukan” sejumlah 16 orang (26,66 %), dan yang menjawab “Tidak baik” sejumlah 23 orang (38,33 %). Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat

disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi kurang baik dan tidak ada respon sama sekali dari masyarakat sehingga anak yang masuk ke sekolah tersebut berkurang sedangkan kepala sekolah beserta dengan staf lainnya telah berusaha semaksimal mungkin agar ada minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut tapi dari masyarakat masih jauh yang diharapkan oleh pihak sekolah.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Menjalin Hubungan Baik Terhadap Kepala Sekolah dan Guru

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, penulis juga melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus, ia menyatakan :

“ Hubungan kepala sekolah dan guru-guru dengan masyarakat terjalin hubungan yang baik atau ada kerja sama ”.

Untuk mendapatkan keabsahan informasi penulis juga melakukan wawancara dengan komite sekolah Menengah Pertama Negeri 6 bersama bapak Daryono pada tanggal 4 Agustus 2012 ia mengungkapkan bahwa:

“Berdasarkan yang saya ketahui hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu dengan menghadiri acara undangan kantor, undangan pernikahan, sunat rasul dan lain-lain dan apabila terjadi musibah maka pihak guru, staf dan kepala sekolah saling berkunjung”.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh salah seorang guru Atika yang penulis wawancarai pada tanggal 7 Agustus 2012 ia menyatakan :

“Hubungan masyarakat dengan sekolah yaitu dengan cara mengikut sertakan masyarakat rapat disekolah dan kepala sekolah sering bersilaturahmi dengan masyarakat”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan guru yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Hubungan kepala sekolah dengan masyarakat seperti Dengan berkonsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa pendapat diatas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kamisah untuk mendapatkan informasi yang jelas wawancara pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan :

“Menjalin hubungan baik dengan guru apabila ada panggilan wali murid tentang siswa selalu menanggapi dengan baik”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarkan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 22

Partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan bapak kepala sekolah dan guru-guru

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
3.	a. Sangat berperan	21	35 %
	b. Berperan	17	28,33 %
	b. Cukup berperan	9	15 %
	c. Tidak berperan	13	21,66 %
	Jumlah	60	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “Sangat berperan” sejumlah 21 orang (35 %), yang menjawab ” berperan” sejumlah 17 orang (28,33 %), yang menjawab “cukup berperan” sejumlah 9 orang (15 %), dan yang menjawab “Tidak berperan” sejumlah 13 orang (21,66 %).

Menurut analisa penulis berdasarkan hasil dari wawancara dengan prosentase diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan kepala sekolah dan guru-guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik seperti menghadiri undangan, kemudian mengadakan takziah apabila masyarakat mendapatkan musibah (meninggal dunia) dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh sekolah kepada masyarakat, begitu juga masyarakat sering memantau kondisi dan keadaan sekolah untuk keberhasilan anak-anak mereka.

Dan hendaknya sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan instansi-instansi lain didalam masyarakat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap pendidikan anak-anak. Misalnya lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kepramukaan, kesenian, lembaga kesehatan, perkumpulan-perkumpulan olah raga, kerja sama dengan kepolisian. Semua itu dapat membantu pendidikan anak-anak baik pendidikan disekolah maupun diluar sekolah. Dan juga guru-guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan selalu siap memahami dan mengkaji sumber-sumber masyarakat yang dapat dimasukkan kedalam rencana perkembangan pendidikan. Juga mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan kebijakan dan program sekolah adalah penting bagi perkembangan pendidikan, dan berarti pula menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangan Tenaga ke SMPN 6 Tebing Tinggi Kepulauan Meranti

Untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan tenaga ke sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, penulis melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

“Selama saya menjadi jabatan sebagai kepala sekolah di sekolah ini belum ada masyarakat memberikan sumbangan tenaganya kepada sekolah karena sebagian masyarakat tidak mau ambil andil untuk

kemajuan sekolah ini padahal sekolah ini sudah lama berdiri dan sudah banyak menamatkan siswa-siswa”.

Pernyataan kepala sekolah diatas dibenarkan oleh komite sekolah yaitu bapak Daryono wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, ia menyatakan :

“Tidak ada, memang warga masyarakat disekitar sini kurang memperhatikan sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Selatpanjang ini”.

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang bernama ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012, ia menyatakan :

“Berdasarkan hal yang demikian saya kurang mengetahuinya karena saya tidak memperhatikan kali mengenai tentang persoalan itu”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Kemungkinan tidak ada masyarakat yang menyumbangkan tenaganya untuk sekolah ini, karena selama ini saya tidak pernah melihat nya”.

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa pendapat di atas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kamisah untuk mendapatkan informasi yang jelas wawancara pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan

“Tidak ada, masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga ke sekolah ini, saya tak pernah melihatnya”

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23

Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan tenaga di Sekolah menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
4.	a. Selalu	10	16,66 %
	b. Sering	9	15 %
	c. Kadang - Kadang	10	16,66 %
	d. Tidak pernah	31	51,66 %
	Jumlah	60	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu” sejumlah 10 orang (16,66 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 9 orang (15 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 10 orang (16,66 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 31 orang (51,66 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat penulis analisa bahwa masyarakat tidak ada menyumbangkan tenaganya kepada ke sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi dan juga kurang antusias dari masyarakat untuk mengembangkan pendidikan didaerah tersebut dapat kita ketahui bahwasanya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 dan 9 yang berbunyi :

Pasal 8 yaitu masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9 yaitu masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk itu diperlukan adanya hubungan kerjasama yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa untuk menjelmakan hubungan kerjasama ini sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat lingkungannya bergotong royong memperbaiki jalan, mengerjakan perbaikan pengairan sawah-sawah juga sebaliknya sekolah bisa membantu menyediakan ruangan untuk keperluan rapat-rapat, perayaan-perayaan, kelompok-kelompok belajar masyarakat dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Partisipasi Masyarakat Membantu Operasional Kegiatan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi

Untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam membantu operasional kegiatan sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, penulis

melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

“Belum ada, karena dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa sekolah telah dibantu oleh pemerintah sepenuhnya oleh karena itu masyarakat sampai sekarang belum ada yang mau membantu operasional sekolah, padahal kami dari pihak sekolah sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk kemajuan sekolah ini”.

Pernyataan kepala sekolah diatas dibenarkan oleh komite sekolah yaitu bapak Daryono wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, ia menyatakan :

“Belum ada, sebagai warga masyarakat saya prihatin melihat kondisi hal seperti ini karena dapat kita ketahui bersama kalau disekolah SMP-SMP lain itu ada sumbangan atau bantuan dari masyarakat tetapi didaerah kita ini masih ada masyarakat yang tidak mau ambil peduli tentang pendidikan atau sekolah ini”

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang bernama ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012, ia menyatakan :

“Tidak ada masyarakat yang membantu operasional sekolah”

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waaka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Ada juga yang ikut serta membantu operasional sekolah ini dan ada juga yang mendukung setiap peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah”.

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa pendapat diatas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kamisah untuk mendapatkan informasi yang jelas wawancara pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan :

“Tidak ada masyarakat yang membantu operasional sekolah”

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24

Partisipasi masyarakat dalam membantu operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
5.	a. Selalu	6	10 %
	b. Sering	11	18,33 %
	c. Kadang - Kadang	11	18,33 %
	d. Tidak pernah	32	53,33 %
	Jumlah	60	100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu” sejumlah 6 orang (10 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 11 orang (18,33%), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 11 orang (18,33 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 31 orang (53,33 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat penulis analisa bahwa masyarakat tidak ada yang membantu operasional

sekolah padahal untuk keberhasilan sekolah tidak lepas dari peran serta dukungan masyarakat, orang tua maupun pemerintah.

6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan infrastruktur sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, penulis juga melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

“Dalam membantu pembangunan sekolah ini tidak ada dari masyarakat yang ada dari pemerintah aja”.

Pernyataan kepala sekolah diatas dibenarkan oleh komite sekolah yaitu Bapak Daryono wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, ia menyatakan :

“Tidak ada sama sekali masyarakat yang membantu pembangunan infrastruktur di sekolah ini”.

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang bernama ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012, ia menyatakan :

” Tidak ada masyarakat yang membantu pembangunan infrastruktur di sekolah ini”

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“Tidak ada masyarakat yang membantu kegiatan pembangunan infrastruktur di sekolah ini”

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa pendapat diatas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kamisah untuk mendapatkan informasi yang jelas wawancara pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan :

“Tidak ada yang membantu kegiatan pembangunan infrastruktur sekolah ini”

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25

Partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan insfratraktur Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
6.	a. Selalu	12	20 %
	b. Sering	11	18,33 %
	c. Kadang - Kadang	9	15 %
	d. Tidak pernah	28	46,66 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu” sejumlah 12 orang (20 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 11 orang (18,33 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 9 orang (15 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 28 orang (46,66 %).

Dengan demikian sesuai dengan prosentase dan hasil wawancara di atas dapat penulis analisa bahwa Partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan insfratruktur Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi ini tidak ada sama sekali.

Sedangkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada pasal 56 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

Ayat 1 yaitu masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Ayat 2 yaitu dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Ayat 3 yaitu komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kesatuan pendidikan.

7. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang

Untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam diskusi/musyawarah yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, penulis melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

“Setiap diadakan rapat/musyawarah selalu melibatkan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki sekolah ini dan mengetahui perkembangan sekolah ini”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan komite sekolah yaitu bapak Daryono wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, ia menyatakan :

“Ya, yaitu dengan cara membentuk komite sekolah yang beranggotakan masyarakat sehingga dapat terjalin dengan baik namun masyarakat belum juga merespon dalam perkembangan sekolah”.

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang bernama ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012, ia menyatakan :

” Iya ada, melihat dari musyawarah apa yang diadakan dalam arti tergantung dari kebutuhan”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“ Iya, ada melibatkan masyarakat”

Berdasarkan yang diungkapkan oleh beberapa pendapat diatas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kamisah untuk mendapatkan informasi yang jelas wawancara pada tanggal 11 Agustus 2012 ia mengungkapkan :

“ Ada, melalui rapat wali murid dan komite sekolah”.

Sedangkan berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan kepada wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Masyarakat ikut serta dalam diskusi/musyawarah yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi.

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
7.	a. Selalu	12	20 %
	b. Sering	11	18,33 %
	c. Kadang - Kadang	8	13,33 %
	d. Tidak pernah	29	48,33%
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu” sejumlah 12 orang (20 %), yang menjawab ”Sering” sejumlah 11 orang (18,33 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 8 orang (13,33 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 29 orang (48,33 %).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan hasil porsentase di atas dapat penulis analisa bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri ini dapat dikategorikan kadang-kadang mengajak masyarakat untuk mengikuti musyawarah

dan kadang-kadang tidak, karena tidak semua kebutuhan sekolah dikasih tahu kepada masyarakat seperti keuangan sekolah dan lain-lain.

8. Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Undangan Dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menghadiri undangan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang, penulis melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus 2012, beliau menyatakan :

” Sebagian kecil masyarakat saja yang mengikuti undangan yang kami berikan”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan komite sekolah yaitu bapak Daryono wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, ia menyatakan :

” Untuk menghadiri undangan yang telah diberikan oleh sekolah ini kepada masyarakat menurut yang saya ketahui jarang masyarakat untuk menghadirinya, dan ada sebagian masyarakat yang menghadiri undang tersebut”.

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang bernama ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012, ia menyatakan :

” Menurut yang saya ketahui masyarakat apabila disebarakan undangan hanya sebagian saja yang menghadirinya padahal undangan yang diberikan itu seluruh wali murid dan pemuka masyarakat”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan guru yaitu bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“ Hanya sebagian saja yang menghadiri undangan dari sekolah ini”

Berdasarkan hasil angket yang telah penulis sebarakan dengan wali murid atau masyarakat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27

Partisipasi masyarakat untuk menghadiri undangan yang diberikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi.

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
8.	a. Selalu	10	16,66 %
	b. Sering	6	10 %
	c. Kadang - Kadang	32	53,33 %
	d. Tidak pernah	12	20 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu ” sejumlah 10 orang (16,66 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 6 orang (10 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 32 orang (53,33 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 12 orang (20 %).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan hasil prosentase di atas dapat penulis analisa bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi ini dapat dikategorikan kurang responya masyarakat terhadap undangan

yang telah diberikan oleh sekolah tersebut dan kebanyakan masyarakat tidak mau ambil andil terhadap perkembangan sekolah tersebut.

9. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Siswa di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam keiutsertaannya untuk mengawasi siswa-siswi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi Selatpanjang, penulis melakukan wawancara dengan kepala Sekolah pada tanggal 2 Agustus, ia menyatakan :

” Ya, ada namun sebagian kecil saja masyarakat yang memberikan pengawasan bagi siswa dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi ini”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan komite sekolah yaitu bapak Daryono wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, ia menyatakan :

” Ya ada, strategi masyarakat dalam pengawasan anak-anaknya cukup melihat dari jauh tentang prilaku dari anak tersebut”.

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka penulis melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang bernama ibu Atika pada tanggal 7 Agustus 2012, ia menyatakan :

” Ya, dilakukan oleh komite sekolah dan ada juga dari orang tua siswa”.

Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Waka Humas yaitu Bapak Husni Mubarak pada tanggal 9 Agustus 2012 ia menyatakan:

“ Iya ada, masyarakat melihatnya dengan cara melihat dari jauh apabila ada atau melihat anak-anak yang keluar dari jam sekolah maka masyarakat melaporkan kepihak sekolah”.

Kemudian berdasarkan angket yang penulis sebarakan dengan orang tua siswa atau wali murid yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 28

Partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan bagi siswa dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang

No item	Alternatif jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
9.	a. Selalu	24	40 %
	b. Sering	14	23,33 %
	c. Kadang - Kadang	13	21,66 %
	d. Tidak pernah	9	15 %
	Jumlah	60	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab “ Selalu ” sejumlah 24 orang (40 %), yang menjawab ” Sering” sejumlah 14 orang (23,33 %), yang menjawab “kadang-kadang” sejumlah 13 orang (21,66 %), dan yang menjawab “Tidak pernah” sejumlah 9 orang (15 %).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru dan hasil porsentase di atas dapat penulis analisa bahwa Masyarakat memberikan pengawasan bagi siswa dilingkungan sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi sudah dilakukan oleh masyarakat untuk

memantau anak-anak mereka dalam proses pembelajaran, agar siswa-siswa bisa mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh sekolah.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 66 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

Ayat 1 : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat 2 : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Ayat 3 : Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatas bahwasanya pengawasan itu bukan saja dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah juga bisa dilakukan oleh masyarakat agar proses pendidikan maupun proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu pendidikan dewasa ini perlu sekali dilakukan pengawasan atau pengontrolan bagi anak-anak secara berkelanjutan sebab pendidikan sebagai wahana untuk kemajuan dan perkembangan anak baik dalam segi keilmuan maupun dalam segi prilaku.

E. Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Antara Madrasah Tsanawiyah Negeri Dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Untuk menganalisis tentang perbandingan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, peneliti mengumpulkan data berupa angket dan wawancara. Data yang sudah terkumpul kemudian di kualifikasikan atau dituangkan kedalam bentuk angka-angka, sehingga data tersebut bersifat kuantitatif. Selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif. Pengalihan data kedalam bentuk kuantitatif ini ditempuh dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Dengan Keterangan : P = Persentase

F = Frekuensi Responden

N = Total Jumlah

Penjabaran dari rumus di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Antara Madrasah Tsanawiyah Negeri Dengan Sekolah Menengah Pertama 6 Tebing Tinggi Selatpanjang Kepulauan Meranti

No	Aspek Perbandingan	Alternatif Jawaban	MTsN		SMPN 6	
			Frekuensi (f) 120	Prosentase (%)	Frekuensi (f) 60	Prosentase (%)
1	Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Ide atau Gagasan Untuk Kemajuan Sekolah	a. Selalu & Sering	46	38,32 %	23	38,33 %
		b. Kadang-kadang	34	28,33 %	26	43,33 %
		c. Tidak Pernah	40	33,33 %	11	18,33 %
2	Tanggapan Masyarakat Untuk Memasukkan Anaknya	a. Sangat Baik & Baik	82	67,88 %	21	35 %
		b. Meragukan	16	13,33 %	16	26,66 %
		c. Tidak Baik	22	18,33 %	23	38,33 %
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Menjalin Hubungan Baik dengan pihak sekolah	a. Sangat Berperan	45	37,5 %	22	36,66 %
		b. Cukup	64	53,33 %	17	28,33 %
		c. Tidak Berperan	11	9,16 %	21	35 %
4	Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangsi	a. Selalu & Sering	35	25,16 %	19	31,66 %
		b. Kadang-kadang	26	21,66 %	10	16,66 %
		c. Tidak Pernah	59	49,16 %	31	51,66 %
5	Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Operasional Sekolah	a. Selalu & Sering	45	37,49 %	17	28,33 %
		b. Kadang-kadang	13	10,83 %	11	18,33 %
		c. Tidak Pernah	62	51,66 %	32	53,33 %
6	Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu	a. Selalu & Sering	91	75,38 %	23	38,33 %
		b. Kadang-kadang	19	15,83 %	9	15 %

	Infrastruktur	c. Tidak Pernah	10	8,33 %	28	46,66 %
7	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah	a. Selalu & Sering	98	81,21 %	23	38,33 %
		b. Kadang-kadang	12	10 %	8	13,33 %
		c. Tidak Pernah	10	8,33 %	29	48,33 %
8	Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Undangan Sekolah	a. Selalu & Sering	96	79,10 %	10	16,66 %
		b. Kadang-kadang	11	9,16 %	32	53,33 %
		c. Tidak Pernah	13	10,83 %	12	20 %
9	Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Pengawasan Siswa	a. Selalu & Sering	91	75,38 %	38	40 %
		b. Kadang-kadang	10	8,33 %	13	21,66 %
		c. Tidak Pernah	19	15,85 %	9	15 %

Berdasarkan data persentase di atas, maka peneliti mengklasifikasikannya sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- a. 0 % - 40% = Sangat Kurang
- b. 41% - 60% = Jarang
- c. 61% - 80% = Sering
- d. 81% - 100% = Selalu

Tabel Analisis Perbandingan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Antara Madrasah Tsanawiyah Negeri Dengan Sekolah Menengah Pertama 6 Tebing Tinggi Selatpanjang Kepulauan Meranti

No	Aspek Analisis Perbandingan	Alternatif Jawaban	MTsN		SMPN 6	
			Prosentase (%)	Hasil Analisis	Prosentase (%)	Hasil Analisis
1	Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Ide atau Gagasan Untuk Kemajuan Sekolah	Selalu, Sering & Kadang-kadang	66, 65 %	Sering	81, 66 %	Selalu
2	Tanggapan Masyarakat Untuk Memasukkan Anaknya	Sangat Baik & Baik	67, 88 %	Sering	35 %	Sangat Kurang
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Menjalin Hubungan Baik dengan pihak sekolah	Sangat Berperan & Cukup Berperan	90, 83 %	Selalu	64, 99 %	Sering
4	Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Sumbangsi	Selalu, Sering & Kadang-kadang	46, 82 %	Jarang	48, 22 %	Jarang
5	Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Operasional Sekolah	Selalu, Sering & Kadang-kadang	48, 32 %	Jarang	46, 66 %	Jarang
6	Partisipasi	Selalu &	91, 11 %	Selalu	53, 33 %	Jarang

	Masyarakat Dalam Membantu Infrastruktur	Sering				
7	Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah	Selalu, Sering & Kadang-kadang	91, 21 %	Selalu	51, 66 %	Jarang
8	Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Undangan Sekolah	Selalu, Sering & Kadang-kadang	88, 26 %	Selalu	69, 99 %	Sering
9	Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Pengawasan Siswa	Selalu, Sering & Kadang-kadang	83, 71 %	Selalu	61, 66 %	Sering

Dari penyajian data di atas dapatlah diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan madrasah tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi masih sangat cukup baik. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat memiliki kepedulian dengan kemajuan sekolah.

Menurut Ary H. Gunawan bahwa keberhasilan suatu sekolah tidak terlepas dari tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat maupun pemerintah dan warga sekolah.¹⁰ Menurut Ackerman dan Alscott dalam bukunya "*The Stakeholder society*", sebagaimana yang dikutip oleh Tilaar menjelaskan bahwa

¹⁰ Ary H. Gunawan, , *kebijakan-kebijakan Pendidikan*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1995), h 122

masyarakat dewasa ini merupakan masyarakat yang sadar akan apa yang ingin dicapainya. Didalam masyarakat yang demikian yang disebut sebagai *the stakeholders society* adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.¹¹

Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri sangat bagus sekali sehingga kapasitas lokal yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan siswa, apalagi Madrasah Tsanawiyah Negeri merupakan salah satu sekolah yang difavoritkan. Hal ini terlihat dari jumlah siswa baru yang mendaftar pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 370 siswa sedangkan target hanya sekitar 250 siswa, tentu hal ini jauh diluar perkiraan, sehingga kapasitas lokal yang ada tidak mencukupi, oleh karena itu kepala sekolah berniat untuk mengembangkan sekolah dengan membangun sekolah yang baru, yang tanahnya masih dalam proses pemilikan.

Sedangkan tanggapan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi sangatlah kurang sekali, hal ini terlihat dari penerimaan murid baru, yang mana hanya menerima 15 siswa itupun setelah anak tersebut tidak diterima di sekolah lain, baru masuk ke SMPN 6, walaupun sekolah sudah berusaha dengan memberikan seragam gratis, dikarenakan bangunan fisik sekolah yang kurang bagus tidak seperti bangunan sekolah yang lainnya, di tambah lagi dengan sarana dan prasarana sekolah yang masih serba kurang.

¹¹ H. M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2008), h. 27

Menurut Zainuddin dalam buku " *Reformasi Pendidikan*" bahwa masyarakat merupakan pemegang hak sehingga tujuan lembaga-lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bukan hanya menampung apa yang diinginkan oleh birokrasi. Dalam masyarakat yang demikian proses pendidikan ditentukan oleh para stakeholder didalam masyarakat yaitu masyarakat, orang tua, peserta didik, negara dan pengelola profesional pendidikan.¹²

Partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan baik dengan Kepala Madrasah dan guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang selalu bekerjama, terlihat dengan adanya musyawah melalui komite sekolah dan adanya kerjasama yang dilakukan masyarakat yang sangat membantu untuk mencapai keberhasilan sekolah berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah. Juga dengan peduli terhadap lingkungan sekolah, dengan cara ikut serta menghadiri undangan yang diberikan masyarakat. Sedangkan hubungan masyarakat dengan Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah menengah Pertama Negeri 6 juga berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan guru, yaitu dengan menghadiri setiap undangan dari masyarakat seperti menghadiri undangan penganten dan sunat rasul di lingkungan sekitar sekolah.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam menanamkan investasi yang berupa SPP, pajak dan sebagainya, tetapi juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan serta hal-hal yang menyangkut proses

¹² *Ibid*

belajar, dan didalam masyarakat harus ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua aspek manajemennya.¹³

Dalam hal masyarakat memberikan sumbangan tenaga terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang, terlihat dengan adanya masyarakat memberikan sumbangan berbentuk bahan baku, seperti semen, batu bata, pasir dan kayu untuk pembangun tempat parkir kendaraan guru-guru. Tetapi belumlah sesuai dengan fungsi dan perannya dalam kemajuan sekolah. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi tidak ada masyarakat yang memberikan sumbangan tenaga.

Selanjutnya Masyarakat membantu operasional Madrasah Tsanawiyah Negeri, dengan membantu menyumbangkan barang-barang berupa kursi, meja dan peralatan atau kebutuhan sekolah dan ada juga yang memberikan tumbuhan untuk penghijauan sekolah.

Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi masyarakat tidak ada yang pernah membantu operasional sekolah tersebut.

Menurut Made Pidarta menjelaskan pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang berlaku juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan. Jadi di samping masyarakat mempunyai kewajiban membiayai pendidikan mereka juga mempunyai kewajiban memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah. Kewajiban ini perlu diinformasikan

¹³ *Ibid*, h 28

kepada masyarakat luas, agar mereka menjadi lebih paham. Dengan demikian partisipasi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan semakin besar.¹⁴

Peran masyarakat dalam membantu perkembangan infrastruktur Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang, terlihat dengan adanya bantuan dari masyarakat baik materil maupun tenaganya untuk membangun sekolah sehingga fasilitas madrasah ini terpenuhi seperti adanya laboratorium dan mushalla.

Sedangkan peran masyarakat dalam membantu perkembangan infrastruktur sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi tidak ada sama sekali, karena hal ini disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut masih tergolong ekonomi lemah, sehingga jangankan untuk membantu sekolah untuk kehidupan mereka sendiri aja masih sulit.

Selanjutnya dalam hal masyarakat ikut serta dalam diskusi/musyawahar yang dilaksanakan Madrasah Tsanawiyah Negeri, yaitu selalu melibatkan Komite Sekolah sebagai perwakilan dari Masyarakat, apalagi menyangkut masalah keuangan sekolah, pembangunan sekolah maupun masalah peraturan anak, karena semua itu tidak terlepas dari dukungan orang tua wali murid atau masyarakat.

Sedangkan dalam hal masyarakat ikut serta dalam diskusi/musyawahar yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi, hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat/orang tua murid karena menurut mereka tidak semua kebutuhan sekolah harus diberitahukan kepada masyarakat.

¹⁴ Made Pidarta, *Landasan Pendidikan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1997),h 45

Adapun dalam hal masyarakat memberikan pengawasan bagi siswa dilingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap siswa yang membolos sekolah dan melihat dari jauh tentang siswa-siswa yang membolos ketika jam pelajaran masih berlangsung dengan cara melaporkan siswa yang bolos itu kesekolah, sehingga selanjutnya sekolah mengambil tindakan terhadap anak yang bolos tersebut. Juga ada masyarakat yang langsung datang ke madrasah untuk memantau tentang perkembangan anaknya.

Begitu juga dengan pengawasan yang dilaksanakan masyarakat terhadap siswa di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 tebing Tinggi di selatpanjang dengan cara melihat dari jauh apabila ada-anak-anak atau siswa yang keluar pada jam sekolah maka masyarakat melaporkan anak tersebut ke sekolah.

Menurut Anas Sudijono mengungkapkan bahwa pengawasan yang baik itu adalah pengawasan mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup; a) kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung, dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan; b) kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran; c) kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran; d) minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pelajaran; e) keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung; f) peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya; g)

komunikasi dua arah antara murid dan guru selama proses pembelajaran berlangsung.¹⁵

Pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan hendaklah memiliki porsi tersendiri sehingga kepedulian masyarakat dalam kemajuan sebuah lembaga pendidikan terealisasi dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan antara lain:

1. Faktor Kemauan

Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap seperti:

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.
- c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri.
- d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan.

¹⁵ Anas Sidijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), h 30

- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya

2. Faktor Kemampuan

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik antara lain adalah:

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah.
- b. Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- c. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki

Menurut *Robbins* Kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut *Robbins* menyatakan pada hakikatnya kemampuan individu tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

3. Faktor Kesempatan

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh:

- a. Kemauan Sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan pendidikan.
- b. Kesempatan untuk memperoleh informasi dari sekolah/madrasah.

- c. Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya pendidikan.
- d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna.
- e. Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan, serta sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang termasuk kategori yang baik, hal ini terlihat sebagai berikut : a) masyarakatnya sudah memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan sekolah dan masyarakat memberikan respon kepada teman/tetangga agar memasukkan anak ke Madrasah Tsanawiyah Negeri; b) masyarakatnya masih kurang memperhatikan dan memberikan sumbangan materi maupun sumbangan tenaga tetapi ada sebagian masyarakat yang mau membantu sekolah khususnya Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang.
2. Partisipasi masyarakat terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang dalam kategori yang kurang baik hal ini terlihat sebagai berikut : a) masyarakatnya masih kurang membantu sekolah baik memberikan sumbangan materi maupun tenaga; b) masih belum ada partisipasi masyarakat dalam memajukan pengembangan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi ini.
3. Perbandingan antara Madrasah Tsanawiyah Negeri Selat Panjang dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang adalah :

a). Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang memiliki hubungan baik yang sinkronisasi dengan masyarakat hal tersebut berdampak pada banyaknya siswa-siswa yang masuk ke madrasah tersebut. hal itu tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat. b). Sedangkan hubungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang dengan masyarakatnya masih kurang atau masih belum mengadakan pendekatan dengan baik dengan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan kurang berminatnya masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMPN 6.

B. Saran

Dari temuan-temuan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti ingin memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait di Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang, yaitu masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah perlu terus meningkatkan partisipasi terhadap pengembangan sekolah sehingga perkembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang dan mutu pendidikannya lebih baik. Sedangkan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tebing Tinggi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis menyarankan hendaklah menjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat, seperti menjalin kerjasama yang lebih baik dengan orang tua siswa dan masyarakat lainnya sehingga masyarakat merasa memiliki dan merasa berkewajiban untuk turut memajukan sekolah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid al-Hasyimi, 1985. *Arrasulu Arabiyul Murrabiyu*. Riyad.
- Ali Imron, dkk, 2000, *Manajemen Pendidikan*, Malang; UNM.
- Ahmad D. Marimba, 1981. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Anas Sidijono, 2006, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada,
- Ary H. Gunawan, 1995, *kebijakan-kebijakan Pendidikan*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Ainurrapiq Dawam, 2005. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Lista Fariska Putra.
- B. Suryobroto, 2004, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta; PT. Rineka Cipta.
- David Barry, 1984. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Djumhur dan Moh, 1975, Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : CV. Ilmu)
- E. Mulyasa, 2005, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya),
- H.A.R. Tilar, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Tera Indonesia: Magelang.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2003, *Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, Jakarta : FM Fokus Media.
- Hafi Anshari, 1982, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya; Usaha Nasional.
- H. M. Zainuddin, 2008, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Kartini, 1980, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju.
- Koentjoroningrat, 1993, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; PT. Gramedia.

- Langgung, Hasan, 1995. *Manusia dan pendidikan suatu analisis pendidikan psikologi, filsafat dan pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-husna.
- Lexy J. Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lincoln & Guba, 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Malik Fajar, 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia.
- Made Pidarta, 1997, *Landasan Pendidikan*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Mulyasa, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung; Rosda Karya.
- Nana Sudjana, 1988, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung; SINAR BARU.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.
- Prasetya Irawan, 1994, *Analisa Data Kualitatif*, Bandung; Gramedia.
- Ramayulis, 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Risyanti Reza, 2006, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jatinangor : Al qafrint.
- Rivai dan J. Mamusung, 1998, *Hubungan Sekolah dan Masyarakat*, Bandung.
- Saifuddin Azwar, 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salahuddin Wahid, 1999. *Reorientasi Makna Pendidikan Pesantren Bagi Pembentukan Karakter Keilmuan Dan Keislaman Santri*. Jakarta : Rosdakrya.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang; YAI
- Sarjono Arikunto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : UI Press.

- Sarlito Wirawan Sarwono, 2000. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparno Eko Widodo, 2011, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Jakarta: PT. Ardadizya Jaya.
- Soejono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Strauss, Anselm & Corbin Juliet, 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Tehnik-tehnik Teoritisasi Data*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwito dan Fauzan, 2005. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*,. Jakarta: Prenada Media.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Sistem*, Jakarta;Rineka Cipta.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI , 2010, *Manajemen Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Tobroni, 2007. *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah*, artikel.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Jakarta; Sinar Grapika.
- Winarno Surachman, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*,. Bandung: Tarsita.
- Wahyu, MS dan Muhammad MS, 1987, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, (Surabaya: Usaha Nasional,)
- Zakiah Daradjat, dkk, 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta:Bumi Aksara.